

**STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Dzaky Muhammad Daffa

2106016071

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dzaky Muhammad Daffa

NIM : 2106016071

Jurusan : Ilmu Politik

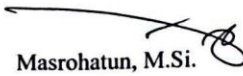
Judul Skripsi : Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing,


Masrohatun, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024**

Disusun Oleh

Dzaky Muhammad Daffa

2106016071

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 25 Juni 2025 dan telah dinyatakan LULUS



Ketua Sidang

Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

Penguji II/Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP: 198511182023211019

Penguji I

Dr. Rofiq, M.Si
NIP: 197303052023211007

Dosen Pembimbing

Masrohatun, M.Si
NIP 198806212018012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Dzaky Muhammad Daffa menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga Pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan



Dzaky Muhammad Daffa

2106016071

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024.” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S1) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat Islam dari masa kegelapan menuju zaman penuh cahaya Islam.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, doa, dan dukungan berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghormatan dan rasa terima kasih yang tulus peneliti haturkan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang telah membagikan ilmu, memberikan arahan, dan nasehat selama penulis belajar di jurusan Ilmu Politik.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si., dan sekretaris jurusan, Ibu Masrohatun, M.Si., yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan ilmu selama proses perkuliahan.
4. Dosen pembimbing, Ibu Masrohatun, M.Si., yang dengan kesabaran membimbing, memberikan masukan, motivasi, serta meluangkan waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dan pengalaman serta membantu penulis dalam urusan administratif selama penyusunan skripsi.
6. Teristimewa untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Rudy Priyadi dan pintu surgaku Ibunda Eni Sulasmi, Orang tua hebatku yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang selalu memberikan doa, pengorbanan, semangat, serta dukungan moral dan materi, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis bisa berada di posisi sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah & Ibu harus selalu ada di

setiap perjalanan & pencapaian hidup saya, I love you more, more and more. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan kepada Bapak dan Ibu dengan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

7. Adik-adikku tercinta, Muhammad Raif Abdusyukur dan Muhammad Adnan Fathul Islam, yang selalu menemani, mendoakan, menghibur, membantu, dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga adik-adikku selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan menjadi pribadi yang baik dan berguna di masa depan.
8. Kepada Chelsea Football Club selaku klub sepak bola *favorite* penulis. Terima kasih telah menemani dan menjadi sumber inspirasi penulis selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Dalam sepak bola, sebagaimana dalam dunia akademik, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan, kerja keras, dan ketekunan. Semangat dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Chelsea Football Club dari setiap pertandingan, latihan, hingga kemenangan sangat menginspirasi penulis untuk tetap berkomitmen, menghadapi tantangan, dan terus melangkah hingga tujuan akhir dapat tercapai.
9. Pegawai KPU Kabupaten Kebumen dan seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serta memberikan izin dan informasi yang sangat membantu kelancaran penyelesaian tugas akhir skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Ilmu Politik kelas A, B, C, dan D UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama masa perkuliahan.
11. Sahabat Seperjuangan di Kota Semarang, Muhammad Maulana Muhson, Rahmat Wahyudi, Budi Cahyono, Candra Yudha Artha Sakti, Muhammad Yusuf Ihsan, Irsya Firdausi, dan Ahmad Yudi Prasetyo, yang telah banyak membantu penulis dengan motivasi, saran, dukungan, dan doa selama pengerjaan skripsi.
12. Sahabat terbaik di tanah asal, Anwar Fachrudin dan Muhammad Firzi Andika, yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
13. Teman-teman PPL, KKL, dan KKN yang telah menemani penulis menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan.
14. Rekan kerja di KAI Wisata, Shopee Express, dan tempat lain yang selalu menerima keluhan kesah serta memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan.
16. Terakhir, ucapan terima kasih kepada diri sendiri, Dzaky Muhammad Daffa, yang telah berjuang dan berusaha keras hingga saat ini, bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan pantang menyerah hingga menuntaskan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan kepada orang tua. Alhamdulillah.

Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat diperbaiki kualitasnya dan bermanfaat bagi para pembaca. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' followed by 'zaky' and 'Daffa' in a cursive script. There is a small star-like mark above the 'y' in 'zaky'.

Dzaky Muhammad Daffa

2106016071

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah kepada

Allah SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak

Budy Priyadi dan Ibu Eni Sulasmi yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal saat menjalani hidup, yang selalu memanjatkan untaian do'a tulus di setiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya.

MOTTO

“Sebagai anak pertama, aku tak selalu kuat. Tapi aku selalu melangkah. Sebab berhenti bukan pilihan, dan menyerah tak pernah kutulis dalam rencana!”

“Dream, believe, and make it happen.”

(Dzaky Muhammad Daffa)

“Bersandarlah kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan penolong.”

QS. Al-Hajj: 78

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”

QS. Al-Baqarah: 2

“You're always one decision away from a completely different life.”

Dalam momen apapun itu kita itu selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah kecil.

Maudy Ayunda

“Bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka”

Farrakhan Khalid Muhammad

“Di rumah, orang tuamu menanti kepulanganmu dengan harapan dan kebanggaan. Jangan biarkan mereka kecewa. Tahan keluh kesahmu, karena lelahmu tak sebanding dengan pengorbanan mereka yang telah berjuang membesarkan dan menghidupimu”

(Dzaky Muhammad Daffa)

ABSTRAK

Pendidikan politik memegang peranan penting dalam membangun kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, terutama saat Pilkada. Melalui pendidikan politik, masyarakat tidak hanya dipahamkan tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga diajak untuk aktif menentukan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik dapat dilakukan secara langsung, seperti melalui sosialisasi tatap muka, seminar, dan diskusi publik, maupun secara tidak langsung lewat media massa, media sosial, dan penyebaran materi edukatif. KPU Kabupaten Kebumen menerapkan kedua metode ini untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih muda dan pemula yang jumlahnya cukup besar. Namun, keberhasilan pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti keterbukaan informasi, dukungan tokoh masyarakat, dan akses teknologi, serta faktor penghambat seperti apatisme politik, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada KPU Kabupaten Kebumen. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan anggota KPU, tokoh masyarakat, pemilih pemula, serta dokumentasi laporan resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik KPU Kebumen pada Pilkada 2024 meliputi peningkatan sosialisasi digital melalui media sosial, pelibatan komunitas pemuda, dan kerja sama lintas sektor dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Sosialisasi tatap muka tetap penting untuk menjangkau masyarakat di pedesaan yang akses digitalnya terbatas, sementara media digital efektif untuk pemilih muda yang lebih familiar dengan teknologi. Faktor pendorong strategi ini adalah keterbukaan KPU terhadap inovasi dan kolaborasi, sedangkan hambatan utama adalah resistensi budaya politik lama dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara metode sosialisasi dan karakteristik demografis pemilih. Diskusi dengan informan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh lokal mampu memperluas jangkauan pesan pendidikan politik, sementara penggunaan media sosial memperkuat keterlibatan pemilih muda. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, KPU perlu terus mengembangkan inovasi metode sosialisasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memperluas kemitraan

dengan berbagai pihak agar pendidikan politik dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada selanjutnya meningkat.

Kata Kunci: Strategi Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, Pilkada Kebumen 2024

ABSTRACT

Political education plays an important role in building awareness and encouraging public participation in the democratic process, especially during regional elections (Pilkada). Through political education, the public is not only informed about their rights and obligations as voters but also invited to actively determine public policies. The implementation of political education can be conducted directly, such as through face-to-face socialization, seminars, and public discussions, as well as indirectly through mass media, social media, and the distribution of educational materials. The Kebumen Regency General Election Commission (KPU) applies both methods to reach various community groups, including a large number of young and first-time voters. However, the success of political education is greatly influenced by supporting factors such as information transparency, support from community leaders, and access to technology, as well as inhibiting factors such as political apathy, low digital literacy, and limitations in human resources and budgets.

This study uses a qualitative approach with a case study at the Kebumen Regency KPU. Data were obtained from in-depth interviews with KPU members, community leaders, first-time voters, as well as documentation of official reports and related literature. The research results show that the political education strategy of KPU Kebumen for the 2024 Pilkada includes increasing digital socialization through social media, involving youth communities, and cross-sector collaboration with schools, community organizations, and religious leaders. Face-to-face socialization remains important to reach rural communities with limited digital access, while digital media is effective for young voters who are more familiar with technology. Supporting factors for this strategy include KPU's openness to innovation and collaboration, while the main obstacles are resistance to old political culture and low digital literacy among some communities.

Further analysis reveals that political education in increasing public participation heavily depends on the synergy between socialization methods and voter demographic characteristics. Discussions with informants indicate that collaboration with educational institutions and local leaders can expand the reach of political education messages, while the use of social media strengthens the involvement of young voters. Nevertheless, challenges such as limited resources and resistance to change remain obstacles that must be overcome. Therefore, KPU needs to continue developing innovative socialization methods, improve public digital literacy, and expand partnerships with various parties so that political education can be more effective and public participation in future Pilkada can increase.

Keywords: *Political Education Strategy, Community Participation, Kebumen Pilkada 2024*

DAFTAR ISI

NOTTA PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi	5
2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Secara Umum.....	8
F. Kerangka Teori	9
1. Definisi Konseptual	9
2. Teori Penelitian	13
G. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber dan Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TEORI PENELITIAN	21
A. Definisi Konseptual.....	21
1. Strategi	21

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22
3. Partisipasi.....	23
B. Kerangka Teori	24
1. Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons	25
BAB III GAMBARAN UMUM	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen	28
1. Letak Geografi dan Luas Wilayah	29
2. Data Kependudukan Kabupaten Kebumen	30
3. Tingkat Pendidikan Kabupaten Kebumen	31
4. Kesehatan.....	32
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen	33
1. Komisi Pemilihan Umum	33
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.....	36
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen	37
4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen	38
5. Data Pemilih Tetap Pilkada 2024	39
BAB IV STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024	40
A. Strategi Pendidikan Politik Secara Langsung	41
1. KPU Goes to School	42
2. KPU Goes To Campus	44
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Disabilitas	47
4. Sosialisasi di Car Free Day (CFD):	50
5. Pelibatan Badan Adhoc PPK & PPS	54
6. Sosialisasi Kepada Kelompok Marjinal.....	57
7. Sosialisasi ke Pasar Tradisional	59
B. Strategi Pendidikan Politik Secara Tidak Langsung.....	62
1. Pemanfaatan Media Sosial dan Digital	62
2. Pemanfaatan Web Resmi KPU Kebumen.....	65
3. Media Televisi dan Radio	67
4.. Media Bahan Sosialisasi	69

BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024	72
A. Faktor Pendorong Strategi Pendidikan Politik KPU	72
1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten	73
2. Interaksi Langsung Masyarakat	77
3. Penggunaan Media Sosial Yang Masif.....	80
B. Faktor Penghambat Strategi Pendidikan Politik KPU	83
1. Disinformasi dan Politik Uang.....	83
2. Apatisme Politik.....	85
3. Tingginya Jumlah Perantau	88
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambar Tentang Lima Kabupaten/Kota Dengan Partisipasi Terendah.....	2
Tabel 2 Data Penduduk Kab. Kebumen Tahun 2024	30
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	32
Tabel 4 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kebumen 2024.....	39
Tabel 5 Presentase Partisipasi dan Golput Pilkada Kebumen.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons	27
Gambar 2 Pola pikir Teori Struktural.....	28
Gambar 3 Peta Kabupaten Kebumen	29
Gambar 4 Struktur Organisasi Komisioner.....	38
Gambar 5 Sosialisasi Goes To School	44
Gambar 6 Sosialisasi Goes to Campus	46
Gambar 7 Sosialisasi Peran Masyarakat Difabel	49
Gambar 8 Sosialisasi di Car Free Day (CFD).....	52
Gambar 9 PPK Kecamatan & PPK Desa	56
Gambar 10 Sosialisasi ke Pasar Tradisional	60
Gambar 11 Akun Media Sosial KPU Kebumen.....	63
Gambar 12 Website Resmi KPU Kebumen	66
Gambar 13 Pegawai KPU Kebumen melaksanakan Sosialisasi	74
Gambar 14 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kebumen.....	77
Gambar 15 Sosialisasi Secara langsung oleh KPU Kebumen	79
Gambar 16 Pemanfaatan Media Sosial KPU Kebumen	82
Gambar 17 Sosialisasi KPU Kebumen kepada masyarakat agar tidak apatis	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), partisipasi aktif warga negara tidak hanya mencerminkan legitimasi pemerintahan terpilih, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik masyarakat merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan bersama. Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Tingginya tingkat partisipasi mencerminkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses politik, sementara rendahnya partisipasi dapat menunjukkan apatisme atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada (Dewi, 2022).

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seringkali masih rendah, yang dapat mengancam legitimasi hasil pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik yang efektif. Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka menunjukkan bahwa KPU berperan sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik untuk meminimalisir golput. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kebumen tahun 2024, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjadi fokus utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. KPU memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan inklusif. Melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU berupaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Strategi ini mencakup pendekatan komunikasi yang efektif, penggunaan media sosial, serta keterlibatan langsung dengan komunitas lokal (Muhazir, 2023).

Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah dengan Tingkat partisipasi 5 besar terendah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, berikut adalah 5 besar tingkat partisipasi terendah pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah:

Tabel 1 Gambar Tentang Lima Kabupaten/Kota Dengan Partisipasi Terendah

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih (%)
1	Kota Semarang	68,60 %
2	Pemalang	68,00 %
3	Wonosobo	65,45 %
4	Kebumen	63,64 %
5	Grobogan	53,55 %

Sumber: KPU Jawa Tengah

Dari data di atas, berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi ini adalah pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi yang menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Sebagian pemilih khawatir akan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka jika harus ikut serta dalam pemilihan. Kekhawatiran ini semakin meningkat akibat kurangnya sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang diterapkan selama proses pemilihan, sehingga menambah keraguan untuk berpartisipasi. Minimnya persaingan politik membuat pemilih merasa bahwa hasil pemilihan sudah dapat diprediksi, sehingga partisipasi mereka dianggap tidak berdampak signifikan terhadap hasil akhir. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya partisipasi adalah tingginya mobilitas penduduk, terutama di kalangan perantau. Banyak pemilih yang berada di luar daerah pada saat pemilihan dan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Situasi ini menegaskan perlunya strategi khusus untuk menjangkau pemilih yang berada di perantauan (Wahyuni, 2021).

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, angka partisipasi pemilih menunjukkan perbedaan mencolok antar kabupaten/kota. Pada Pilkada serentak 2020, misalnya, Kabupaten Boyolali mencatat partisipasi pemilih tertinggi dengan angka 89,53%, jauh melampaui rata-rata provinsi yang hanya 74,37% (Kompas, 2020). Tingginya partisipasi di Boyolali ini menandakan keberhasilan strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU setempat, serta antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Pada Pilkada 2024, posisi puncak partisipasi di Jawa Tengah berpindah ke Kabupaten Rembang, dengan tingkat partisipasi mencapai 88,62% untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati, serta 88,73% untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Nur FM Rembang, 2024).

Data ini memperlihatkan adanya konsistensi partisipasi tinggi di beberapa wilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial-politik lokal, peran aktif relawan demokrasi, dan intensitas kampanye para kandidat. Kabupaten Rembang bahkan berhasil melampaui daerah-daerah seperti Kudus dan Boyolali yang sebelumnya dikenal memiliki partisipasi tinggi.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 1.281,115 km². Dengan luas tersebut, Kebumen menempati peringkat ke-9 sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah. Wilayah ini terdiri dari 26 kecamatan dan 460 desa/kelurahan, yang menunjukkan kompleksitas geografis dan administratif yang signifikan. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.077.299 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki berjumlah 543.072 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 534.227 orang. Para pemilih ini tersebar di 4.831 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencakup seluruh wilayah kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen. Menariknya, data menunjukkan bahwa generasi milenial (lahir tahun 1981-1996) merupakan kelompok pemilih terbesar dalam DPT Pilkada 2024 di Kabupaten Kebumen, dengan jumlah mencapai 342.214 pemilih atau sekitar 31,8% dari total DPT. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan hasil pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, 2024).

Meskipun memiliki potensi besar dalam hal jumlah pemilih, Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan terkait partisipasi politik masyarakat. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 75,85%, yang masih di bawah target nasional sebesar 80% (Bawaslu Kabupaten Kebumen, 2024). Hal ini menunjukkan adanya isu golput dan apatisme politik di kalangan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Fenomena golput dan apatisme politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kepercayaan terhadap proses politik, minimnya informasi tentang calon dan program kerja, serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah sebelumnya. Kondisi ini menuntut KPU Kabupaten Kebumen untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024.

Strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang merupakan kelompok pemilih terbesar. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama, dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat akan memperkuat upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Kebumen memiliki potensi besar dalam hal jumlah pemilih dan luas wilayah, tantangan terkait partisipasi politik masyarakat masih menjadi isu yang perlu diatasi. Melalui strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat meningkat pada Pilkada 2024 mendatang.

Kajian mengenai Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada memang cukup banyak yang meneliti. Beberapa peneliti diantaranya seperti (Hidayat, 2023), (Chaidir, 2018), (Zulkarnain, 2023), (Megawati, 2020), (Kasim, 2023), (Marsal 2019). Temuan penelitian sebelumnya juga menjelaskan beberapa strategi atau inisiatif yang dilakukan KPU guna menaikkan keterlibatan, termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula serta Masyarakat adalah hal penting dalam penelitian ini. Penelitian saya akan memberikan wawasan baru terkait peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilu 2024, dengan pendekatan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya, serta fokus dan waktu yang berbeda. Penelitian ini akan mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada Pilkada 2024, serta menganalisis dampak strategi tersebut terhadap partisipasi politik. Dengan latar belakang ini, penulis memilih judul "Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024". Harapannya, penelitian ini dapat membantu meningkatkan strategi KPU Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang agar lebih baik lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah tersebut, isu-isu yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh KPU Kebumen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi strategi pendidikan politik KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kebumen 2024?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi Pendidikan politik yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2024
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Pendidikan politik yang dihadapi KPU Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua jenis, yakni manfaat teoritis serta manfaat penelitian praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah wawasan dalam bidang akademis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembaca

Meningkatkan pemahaman pembaca mengenai fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong partisipasi aktif Kabupaten Kebumen untuk berpartisipasi pada Pilkada tahun 2024

b) Bagi peneliti

Menambah keahlian, pengalaman, dan pemahaman saat melaksanakan kajian mengenai Strategi Pendidikan politik KPU Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat dalam Pilkada 2024.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini bukanlah penelitian baru melainkan sudah banyak ahli atau pakar yang menelitinya, oleh karena itu untuk mengetahui posisi penelitian ini dari penelitian yang lain, maka tinjauan Pustaka ini dibagi menjadi dua tem

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi

Hidayat, B. (2023) penelitiannya berjudul "Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Solok" membahas strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Kota Solok dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Solok

menerapkan strategi sosialisasi yang mencakup pendekatan emosional dan promosi melalui media sosial. Pendekatan emosional dilakukan dengan membangun kedekatan dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Sementara itu, promosi di media sosial dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda, dengan menyebarkan informasi terkait pemilu secara luas dan cepat. Media sosial menjadi alat penting dalam strategi sosialisasi KPU Kota Solok. Dengan memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, KPU dapat menyampaikan informasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pemilihan, dan pentingnya partisipasi secara efektif. Hal ini juga membantu dalam menjangkau pemilih pemula dan generasi muda yang lebih aktif di dunia digital.

Chaidir, M. R. (2018) penelitiannya berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Partisipasi politik masyarakat dianggap penting karena keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan mewujudkan legitimasi yang kuat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang terencana dan terstruktur. Dengan memperhatikan sasaran, metode, dan evaluasi yang tepat, diharapkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pasuruan dapat meningkat, sehingga mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan legitim.

Zulkarnain, A. A., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, I. (2023) penelitiannya berjudul “Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” membahas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024. Pemilih pemula, yang merupakan individu yang baru memenuhi syarat untuk memilih, memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mereka tentang proses pemilu dan rendahnya minat untuk berpartisipasi.

Megawati, M., & Padang, A. T. (2020) penelitiannya berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” membahas dan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari anggota KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS), dan Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pengetahuan politik, pendidikan politik, dan sikap apatis di kalangan pemilih pemula. Disarankan agar KPU terus mengembangkan strategi sosialisasi yang inovatif dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Kasim, S., Sonni, A. F., & Farid, M. (2023) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Strategi Pemanfaatan Media Komunikasi KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020” penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020, yang merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mempengaruhi minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mengatasi hal ini, KPU Kota Makassar memanfaatkan media komunikasi sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Kota Makassar memanfaatkan berbagai jenis media komunikasi, baik media massa (seperti radio, televisi, dan surat kabar) maupun media sosial (seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube). Pemilihan media ini didasarkan pada kemudahan akses oleh masyarakat dan perkembangan era digital. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memaksimalkan sosialisasi tahapan pilkada.

Putri, N. E. (2019) dalam penelitiannya dengan judul “Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Kada Tahun 2018” membahas strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Tahun 2018. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan KPU Kota Padang dalam menyelenggarakan pemilihan. KPU Kota Padang menargetkan tingkat partisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dapat

naik dari tahun sebelumnya pada tahun 2013 yang hanya 53,58%. KPU Kota Padang menggunakan berbagai strategi komunikasi, seperti sosialisasi melalui media massa, media sosial, dan kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat. Selain itu, KPU juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai partisipasi yang optimal, seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya memilih.

Tuala, D., Rondonuwu, A., & Rengkung, F. (2024) dalam penelitiannya berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020” membahas strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Kao Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kejelasan dalam strategi yang digunakan serta tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Strategi tersebut diformulasikan dengan mempertimbangkan karakteristik pemilih pemula dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Secara Umum

Marsal, S., & Putra, E. V. (2019) dalam penelitiannya berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Sosiologi Politik” membahas membahas strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi pemilih di Kota Padang pada pemilu sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menggunakan perspektif sosiologi politik untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi perilaku pemilih.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017) dalam penelitiannya berjudul “Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagai indikator keberhasilan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menghadapi

tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Malang yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan strategi yang diterapkan oleh KPU.

Haryono, D. (2019) penelitiannya berjudul “Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015” penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Samarinda pada pemilihan kepala daerah sebelumnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2015. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 mencakup penguatan kelembagaan, sosialisasi politik, dan pendidikan pemilih pemula. Untuk meningkatkan efektivitas strategi tersebut, disarankan agar KPU terus berinovasi dalam metode sosialisasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta partai politik.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini, penulis hendak menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pembahasan kerangka teori disajikan dalam dua bagian, yaitu definisi konseptual dan landasan teori. Penyajian definisi konseptual sangat penting guna memberikan pemahaman kepada pembaca terkait istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Strategi, dalam konteks pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan serangkaian perencanaan dan tindakan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Menurut (Chandler, 1962) dalam bukunya "Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise", strategi merupakan proses yang mencakup penetapan tujuan jangka panjang organisasi, pemilihan

tindakan atau cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut, serta alokasi sumber daya secara tepat guna mendukung pelaksanaan tindakan yang telah dipilih. Dengan kata lain, strategi bukanlah sekadar rencana taktis jangka pendek, melainkan kerangka berpikir jangka panjang yang menyeluruh dan terstruktur, yang melibatkan keputusan-keputusan besar yang berdampak pada arah dan eksistensi organisasi ke depan.

(Robbins, 2018) mendefinisikan bahwa strategi sebagai rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan rangkaian tindakan ke dalam satu kesatuan yang kohesif. Definisi ini menekankan bahwa strategi bukan sekadar rencana jangka panjang, melainkan merupakan keterpaduan antara tiga elemen penting:

- a. Tujuan utama organisasi mencakup apa yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang.
- b. Kebijakan tentang pedoman atau aturan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan.
- c. Rangkaian tindakan terkait langkah-langkah konkrit atau tindakan taktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan menyatukan ketiga aspek ini, strategi berfungsi sebagai panduan menyeluruh dalam pengelolaan organisasi agar dapat bergerak secara konsisten menuju visi dan misinya. Strategi juga membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dinamis.

Sementara itu, menurut (Mintzberg, 1998) strategi adalah pola dalam suatu aliran keputusan atau tindakan, baik yang disengaja (*deliberate*) maupun muncul secara tidak sengaja (*emergent*). Henry Mintzberg berpendapat bahwa strategi tidak hanya merupakan satu hal tunggal, tetapi dapat dipahami dalam lima pengertian berbeda yang ia sebut sebagai "5P for Strategy", yaitu:

- a. *Plan* (Rencana) mencakup strategi sebagai suatu rencana yang dibuat secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. *Ploy* (Tipu Muslihat) berhubungan dengan strategi sebagai taktik khusus untuk mengalahkan pesaing.
- c. *Pattern* (Pola) adalah Strategi sebagai pola dalam suatu alur tindakan, baik yang disengaja maupun yang muncul dari kebiasaan.

- d. *Position* (Posisi) mencakup Strategi sebagai posisi organisasi dalam lingkungan eksternal.
- e. *Perspective* (Perspektif) mencakup Strategi sebagai cara pandang atau ideologi organisasi.

b. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Dalam kamus KBBI, "komisi" diartikan sebagai suatu badan atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu, sedangkan "pemilihan umum" didefinisikan sebagai pemungutan suara oleh seluruh rakyat secara serentak untuk memilih wakil-wakil rakyat atau pejabat negara tertentu. Dengan demikian, KPU dapat dipahami sebagai badan yang diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan proses pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara mendalam, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri berarti bahwa KPU bekerja secara independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tugas utama KPU meliputi merancang dan menetapkan jadwal serta tahapan pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, menetapkan peserta pemilu, hingga menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih tetap. Selain itu, KPU juga bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dalam menjalankan tugasnya, KPU juga berkoordinasi dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan lembaga terkait lainnya untuk menjamin integritas proses demokrasi.

KPU memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah, yaitu Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan pemilu berlangsung secara efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Dalam praktiknya, KPU juga berperan sebagai fasilitator pendidikan politik masyarakat agar pemilih lebih sadar akan hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, fungsi KPU tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, guna menciptakan pemilu yang berintegritas tinggi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Sebagai kesimpulan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan permanen, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di

Indonesia secara demokratis, jujur, dan adil. Keberadaan KPU sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang sah di Indonesia.

c. Partisipasi

Partisipasi adalah konsep yang menggambarkan keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas atau proses tertentu. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*participation*" yang memiliki makna turut serta ambil bagian atau keikutsertaan. Partisipasi dapat dipahami dalam tiga pengertian pokok: sebagai kontribusi, organisasi, dan pemberdayaan. Partisipasi sebagai kontribusi menekankan pada sumbangan partisipasi tanpa paksaan dari Masyarakat terhadap suatu proyek tanpa terlibat dalam menentukan keputusan. Sebagai organisasi, partisipasi melibatkan pembentukan struktur atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan aktif. Sementara itu, partisipasi sebagai pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengendalikan dan mempengaruhi proses yang memengaruhi kehidupan mereka (Oakley, 1991)

(Sastropoetro, 2000) mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang terjadi secara spontan, disertai dengan kesadaran serta tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Menurut (Sastropoetro, 2000), partisipasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pikiran, yaitu keterlibatan dalam bentuk pemberian pendapat dan perencanaan berbagai kegiatan guna mendukung keberhasilan suatu program atau kegiatan.
- b. Partisipasi dalam tenaga, yaitu kontribusi berupa tenaga yang diberikan oleh Sebagian atau seluruh Masyarakat agar suatu kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik
- c. Partisipasi dalam keahlian, yaitu bentuk keterlibatan yang didasarkan pada Tingkat keahlian, keterampilan, Pendidikan, serta profesi yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut (Ndaha, 1990) partisipasi dapat dibagi menjadi enam bentuk atau tahapan:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) yang berfungsi sebagai langkah awal dalam mendorong perubahan sosial.

- b. Partisipasi dalam memerhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Keterlibatan dalam merencanakan Pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Keikutsertaan dalam pelaksanaan operasional Pembangunan
- e. Peran serta dalam menerima, merawat, dan mengembangkan hasil Pembangunan
- f. Partisipasi Keterlibatan dalam evaluasi Pembangunan, yaitu partisipasi warga mengenai merespon bagaimana pengimplementasian Pembangunan sejalan Bersama dengan perencanaan serta seberapa jauh akhirnya mampu mencukupi kepentingan masyarakat

2. Teori Penelitian

Untuk mendukung penelitian terkait Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024, penelitian ini menggunakan Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori struktural fungsional, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan sistem secara keseluruhan. Parsons menekankan pentingnya konsensus nilai dan norma dalam mempertahankan integrasi sosial, serta peran institusi dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut kepada individu. Parsons menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh berbagai komponen masyarakat. Ia berpendapat bahwa struktur sosial terdiri dari pola-pola perilaku yang terorganisir dan stabil, sementara fungsi merujuk pada kontribusi dari setiap bagian terhadap keseluruhan sistem. Dengan demikian, integrasi dan stabilitas sosial dicapai melalui keterkaitan antara struktur dan fungsi dalam Masyarakat (Parsons, 1951)

Teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons menekankan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi tertentu demi menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Pilkada Kebumen 2024, pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU dapat dipahami sebagai salah satu fungsi penting dalam sistem sosial-politik yang bertujuan menjaga keteraturan dan kelangsungan proses demokrasi. Fungsi ini membantu menciptakan pemahaman bersama tentang nilai-

nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar.

Menurut Parsons, setiap subsistem dalam masyarakat, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan sistem secara keseluruhan. Talcott Parsons menekankan bahwa setiap sistem sosial memiliki empat imperatif fungsional yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan dan berfungsi secara efektif. Keempat imperatif tersebut dikenal dengan akronim AGIL: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L) (Parsons, 1951). Dalam konteks pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), keempat fungsi ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi pendidikan politik dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kebumen 2024 sama halnya bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pemilu, serta menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam proses politik yang demokratis.

Kontribusi utama Parsons adalah pengembangan model AGIL tersebut di atas, yang terdiri dari empat fungsi imperatif yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial:

- a. Adaptation : Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengalokasikan sumber daya. Dalam konteks pendidikan politik, fungsi adaptasi tercermin dalam kemampuan KPU untuk menyesuaikan strategi edukasi politiknya dengan dinamika sosial dan teknologi yang berkembang. Misalnya, penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi politik menunjukkan adaptasi terhadap perubahan perilaku komunikasi masyarakat. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan pendidikan politik dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif.
- b. Goal Attainment : Kemampuan sistem untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Fungsi pencapaian tujuan dalam kerangka AGIL berkaitan dengan upaya KPU dalam menetapkan dan mencapai target partisipasi pemilih dalam Pilkada. Melalui program pendidikan politik, KPU berusaha meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Keberhasilan dalam mencapai tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan efektivitas fungsi ini dalam sistem sosial.
- c. Integration : Kemampuan sistem untuk menjaga kohesi dan koordinasi antara bagian-bagian yang berbeda. Integrasi sosial mengacu pada proses penyatuan berbagai elemen

masyarakat untuk mencapai kohesi dan solidaritas. Dalam konteks Pilkada, pendidikan politik berperan dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda melalui pemahaman bersama tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik. Hal ini membantu mencegah fragmentasi sosial dan memperkuat stabilitas politik lokal.

- d. Latency : Kemampuan sistem untuk memelihara dan mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma budaya. Fungsi laten atau pemeliharaan pola budaya berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung keberlanjutan sistem sosial. Pendidikan politik oleh KPU berkontribusi pada fungsi ini dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hasil pemilu. Melalui proses ini, masyarakat diharapkan mengembangkan sikap dan perilaku yang mendukung sistem demokrasi secara berkelanjutan.

Melalui skema AGIL ini, Parsons menekankan bahwa setiap subsistem dalam masyarakat harus saling mendukung dan memenuhi fungsinya masing-masing agar sistem sosial tetap seimbang dan berkesinambungan. Ketika salah satu fungsi tidak terpenuhi, maka kestabilan sistem sosial dapat terganggu, yang berpotensi menyebabkan disorganisasi sosial. Dengan demikian, skema AGIL Parsons memberikan pemahaman menyeluruh bahwa sistem politik tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial secara keseluruhan. Setiap fungsi dalam skema ini saling melengkapi untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas sistem politik. Jika salah satu fungsi terganggu, maka sistem politik secara keseluruhan dapat mengalami ketidakseimbangan yang berujung pada disfungsi sosial atau bahkan krisis politik.

Dengan menerapkan perspektif struktural fungsional ini, dapat disimpulkan bahwa upaya KPU dalam mengedukasi masyarakat bukan hanya sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari mekanisme fungsional untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem politik lokal. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kebumen 2024 menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik KPU telah berperan sebagai elemen integratif yang penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Teori ini memberikan fondasi penting dalam memahami bagaimana institusi-institusi politik bekerja untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat kompleks modern.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan studi kasus. Pada kasus yang dianalisis adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kebumen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini berfokus pada strategi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrument utama. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap subjek yang diteliti melalui berbagai Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, dan analisis dokumen (Sugiyono, 2016). Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, perilaku, atau realitas sosial dengan melihat dan berinteraksi dengan objek yang diteliti. Proses penelitian ini lebih menekankan pada aspek subjektif, yaitu pandangan atau persepsi subjek yang diteliti, serta makna yang terkandung dalam fenomena tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam tentang fenomena yang memiliki batas-batas tertentu dalam waktu dan tempat. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara mendalam melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran rinci tentang masalah atau fenomena yang terjadi (Creswell, 2018).

2. Sumber dan Data

Sumber data mempunyai 2 sumber, yakni:

- a. Data Primer adalah data yang memungkinkan hasil langsung tentang subjek atau bidang penelitian. Data ini dapat diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kebumen atau dari file atau dokumen lain. Data Primer terdiri dari wawancara dan dokumentasi
- b. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti sendiri dengan tujuan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder, seperti buku, surat kabar, dan media massa, artikel penelitian yang berasal dari beberapa literatur yang sama dan terkait dengan subjek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar proses pengumpulan data lebih efektif, peneliti akan menerapkan tiga Teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Adapun ketiga Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2013) Pada tahap wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk mendapatkan pemahaman tentang fakta, peristiwa, fenomena, atau opini, serta pemikiran dan perasaan orang yang diwawancarai. Perencanaan data dan informasi untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Pada tahap wawancara, pertanyaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa semua informasi dan data dikumpulkan dengan benar menggunakan satu atau dua objek atau individu. Jika mereka merasa semua data sudah cukup dan tidak ada yang baru, peneliti dapat mengakhiri wawancara. Dalam penelitian dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Instagram Pada Pilkada Kabupaten Kebumen" wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak kunci yang memiliki informasi dan pengalaman terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Beberapa informan yang relevan untuk diwawancarai meliputi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen, Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama di Kabupaten Kebumen, Masyarakat (Responden Umum).

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang telah ada. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tambahan dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dokumentasi mencakup segala bentuk bahan tertulis atau film yang dibuat bukan atas permintaan khusus dari seorang penyidik. (Sugiyono, 2013) Dokumen terdiri dari pengumpulan dan analisis data resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, termasuk data pemilih tetap, data partisipasi masyarakat kabupaten Kebumen, dan data perencanaan program untuk pilkada tahun 2024. Peneliti sangat membutuhkan teknik dokumentasi ini untuk mengumpulkan data dan untuk mengambil kesimpulan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mencakup berbagai aktifitas, termasuk pengumpulan referensi, membaca, mencatat, serta mengolah informasi penelitian. Dalam konteks penulisan skripsi, metode ini digunakan untuk menelaah literatur yang ada guna mendukung argumen atau hipotesis yang diajukan. Studi kepustakaan juga membantu peneliti dalam mengikuti kemajuan terkini dalam bidang penelitian yang dikaji dan memastikan bahwa studi yang dilaksanakan tidak mengulang penelitian sebelumnya. Selain itu, studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan metodologis yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat memilih metode yang paling sesuai untuk penelitiannya. Dengan demikian, studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar teori, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang metodologi penelitian yang efektif (Zed, 2008).

4. Metode Analisis Data

Pada penulisan data, Penulis menggunakan teknik analisis data dengan penulisan data. berpikir induktif, yang berarti masalah, subjek penelitian, dan kesimpulan diambil dari data lapangan. Data dianalisis baik selama proses pengumpulan maupun setelah data terkumpul dalam penelitian kualitatif. Peneliti juga melihat tanggapan orang selama wawancara. Peneliti melakukan wawancara tambahan sampai data tersedia dan dianggap dapat dipercaya (reliable) jika tanggapan dianggap tidak memadai. Analisis data kualitatif memperoleh data melalui berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, telaah dokumen, dan rekaman video, yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi hasilnya adalah kata-kata, biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Tiga alur kerja terdiri dari analisis menurut perspektif ini: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014). Menurut Miles dan Huberman, berikut adalah langkah-langkah yang terdapat melalui tiga alur aktivitas yang berlangsung secara serentak dalam analisis data:

A. Reduksi Data

Data Menyederhanakan, mengabstraksi, serta mengubah data dari catatan lapangan adalah proses yang dikenal sebagai reduksi data. Ini adalah proses yang selalu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Ini dimulai dengan pemilihan kerangka konseptual, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, proses seperti ringkasan, pengkodean, identifikasi tema, dan pengelompokan dilakukan. Bahkan setelah

penelitian lapangan selesai, proses ini terus berlanjut hingga laporan akhir dibuat. Peneliti tidak perlu mengubah data menjadi angka atau jumlah.

B. Penyajian Data

Peneliti percaya bahwa menampilkan informasi dalam bentuk kumpulan data dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan. Mereka percaya bahwa penyajian efektivitas merupakan faktor utama dalam menjalankan analisis kualitatif yang terpercaya

C. Menarik Kesimpulan

Miles dan Huberman berpendapat, menarik kesimpulan merupakan salah satu tahap dalam proses penelitian secara keseluruhan. Hasil-hasil ini masih diperiksa selama penelitian berlangsung. Memikirkan kembali temuan, melihat kembali catatan lapangan, atau berbicara dengan rekan kerja adalah beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan ini. Hal ini memiliki peranan krusial dalam menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari data sesuai, kuat, dan sesuai; dengan kata lain, ini memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid. Ketika data dikumpulkan, kesimpulan akhir harus diverifikasi untuk tingkat keyakinan yang lebih tinggi.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan yang sistematis, terorganisir dengan baik, rapi, dan jelas menjadi dasar penyusunan penelitian yang sistematis dan dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk penyelidikan selanjutnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang seluruh isi penelitian.

Bab I Pendahuluan

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan akan dibahas dalam bab ini. Bagian keuntungan penelitian mencakup keuntungan teoritis dan praktis.

BAB II Kerangka Teori

Penulis memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan objek dalam penelitian ini. Adapun teorinya meliputi Teori struktural fungsional Talcott Parsons

BAB III Profil Komisi Pemilihan Umum Kebumen

Pada Bab ini peneliti membahas gambaran umum. Bab ini membahas kondisi geografis dan demografis Kabupaten Kebumen serta profil dan visi misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

BAB IV Bentuk Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat

Bab empat akan membahas bagaimana strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Kebumen melalui program yang dirancang untuk memberikan Literasi Politik kepada pemilih aktif Kabupaten Kebumen.

BAB V Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024

Bab lima akan membahas Faktor pendorong dan penghambat yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kebumen untuk meningkatkan partisipasi politik.(Ilmu et al., 2023; Muhammad Mahadhir, 2016)

BAB VI Penutup

Bab ini akan menyimpulkan atas apa yang telah peneliti lihat di lapangan, kritik, dan saran untuk Komisi Pemilihan Umum Kebumen dan Masyarakat.

BAB II

TEORI PENELITIAN

A. Definisi Konseptual

Untuk membantu mencegah kesalah pahaman mengenai penelitian ini, berikut adalah definisi istilah-istilah beserta keterbatasannya:

1. Strategi

Strategi merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks pendidikan politik, strategi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Menurut (Chandler A. D., 1962), strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang organisasi, pengambilan tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini relevan dalam merancang program pendidikan politik oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi biasanya disusun secara sistematis dan menyeluruh, mencakup langkah-langkah atau metode yang akan diambil guna mengatasi tantangan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, strategi menjadi panduan penting dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya agar hasil yang diinginkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi tidak hanya digunakan dalam bidang militer, tetapi juga telah meluas ke berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Dalam setiap penerapannya, strategi menekankan pada penggunaan akal dan perencanaan untuk mengantisipasi hambatan serta memanfaatkan peluang. Dengan demikian, strategi memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan atau program dalam berbagai konteks.

Dalam konteks kelembagaan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), strategi menjadi alat penting dalam menyusun langkah-langkah yang tepat agar setiap program, termasuk pendidikan politik, berjalan efektif dan berdampak luas. Merujuk pada konteks "Strategi Pendidikan Politik KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kebumen 2024", strategi dapat dimaknai sebagai cara atau pendekatan terstruktur yang dirancang oleh KPU untuk membangun kesadaran politik, meningkatkan pemahaman pemilih, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan

(Mintzberg H. , 2005) yang menyatakan bahwa strategi adalah pola dalam aliran keputusan dan tindakan organisasi, bukan hanya rencana formal, melainkan juga respons adaptif terhadap kondisi eksternal. Dengan demikian, strategi pendidikan politik KPU tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik lokal yang memengaruhi partisipasi pemilih.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir pemilihan umum di Indonesia. KBBI mendefinisikan "komisi" sebagai badan atau institusi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus, sementara "pemilihan umum" dijelaskan sebagai proses pengambilan suara secara massal oleh seluruh masyarakat untuk menentukan wakil rakyat atau pejabat negara. Oleh karena itu, KPU dapat dimaknai sebagai institusi yang mendapat kewenangan dari negara untuk menjalankan proses pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara pemilu yang memiliki karakter nasional, permanen, dan independen. Sifat independen ini mengartikan bahwa KPU beroperasi secara otonom tanpa dapat diintervensi oleh kekuatan politik manapun, termasuk eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Fungsi pokok KPU mencakup penyusunan dan penetapan kronologi serta fase-fase pemilu, penentuan dan pengumuman hasil pemilu, penetapan kontestan pemilu, serta penyusunan dan pembaruan daftar pemilih tetap. KPU juga mengemban tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi terkait lainnya untuk memastikan integritas proses demokratis.

Struktur organisasi KPU tersebar dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Struktur berjenjang ini memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang efektif dan dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam implementasinya, KPU juga menjalankan peran sebagai mediator pendidikan politik masyarakat supaya pemilih memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Dengan demikian, peran KPU tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup dimensi edukatif dan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang

berintegritas tinggi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Sebagai rangkuman, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan permanen, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia secara demokratis, transparan, dan berkeadilan. Eksistensi KPU memiliki peran vital dalam memelihara sistem demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang sah di Indonesia.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan konsep yang menjelaskan keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas atau proses tertentu. Dari segi etimologi, kata ini berasal dari bahasa Inggris "participation" yang bermakna ikut serta mengambil bagian atau keikutsertaan. Konsep partisipasi dapat dimaknai melalui tiga pemahaman utama: sebagai kontribusi, organisasi, dan pemberdayaan. Partisipasi dalam bentuk kontribusi menitikberatkan pada sumbangan sukarela dari masyarakat terhadap suatu proyek tanpa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi, partisipasi melibatkan pembentukan struktur atau mekanisme yang memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif. Sedangkan partisipasi sebagai pemberdayaan fokus pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol dan mempengaruhi proses yang berdampak pada kehidupan mereka (Oakley, 1991).

Di sisi lain, (Ndraha, 1990) mengklasifikasikan partisipasi menjadi enam bentuk atau tahapan. Pertama, partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (contact change) yang berfungsi sebagai langkah awal dalam mendorong perubahan sosial. Kedua, partisipasi dalam memperhatikan dan memberikan respons terhadap informasi, baik dalam bentuk menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, menyetujui, menerima dengan kondisi, maupun menolaknya. Ketiga, keterlibatan dalam merencanakan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, keikutsertaan dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Kelima, peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. Keenam, partisipasi dalam evaluasi pembangunan, yaitu keterlibatan warga dalam merespons bagaimana implementasi pembangunan selaras dengan perencanaan serta sejauh mana hasilnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi secara umum diartikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu kegiatan sosial, politik, atau pemerintahan. Menurut (Huntington, 1976), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Pilkada,

partisipasi masyarakat mencerminkan sejauh mana masyarakat ikut berperan dalam menentukan arah pemerintahan daerah melalui hak pilihnya. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kehadiran saat pemungutan suara, tetapi juga mencakup kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan dalam seluruh proses pemilu.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan politik. Pendidikan politik oleh KPU berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh (Surbakti R. , 1992). partisipasi politik dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, melalui berbagai metode seperti sosialisasi tatap muka, media digital, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, KPU Kebumen berupaya mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya hak pilih dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam praktiknya, partisipasi tidak serta-merta tumbuh tanpa dorongan. Pendidikan politik menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Di wilayah seperti Kebumen, tantangan partisipasi pemilih sering kali dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial ekonomi, serta tingkat literasi politik masyarakat. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik yang inklusif dan kontekstual menjadi sangat penting untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif.

KPU Kebumen memandang bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan indikator keberhasilan demokrasi lokal. Dalam Pilkada 2024, peningkatan partisipasi bukan hanya target numerik, tetapi juga kualitas dari partisipasi itu sendiri—yakni partisipasi yang didasarkan pada kesadaran dan pemahaman. Sejalan dengan itu, Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menegaskan bahwa partisipasi politik yang efektif harus dilandasi oleh tiga faktor utama: resources (sumber daya), engagement (keterlibatan), dan recruitment (rekrutmen). Pendidikan politik yang dilakukan KPU berupaya membangun ketiganya agar demokrasi lokal dapat berjalan secara sehat dan partisipatif.

B. Kerangka Teori

Teori struktural fungsional yang dirumuskan oleh Talcott Parsons merupakan cara pandang dalam studi sosial yang mengutamakan signifikansi struktur sosial dan peran-peran yang dijalankan oleh setiap komponen dalam sistem kemasyarakatan. Parsons memahami masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan berkolaborasi untuk mencapai stabilitas serta keteraturan sosial. Dalam perspektif ini, setiap

lembaga sosial mempunyai fungsi spesifik yang krusial untuk mempertahankan keseimbangan sistem secara menyeluruh. Kerangka teoretis ini memberikan wawasan bahwa keterlibatan individu atau kelompok dalam masyarakat tidak bersifat independen, melainkan merupakan bagian dari proses sosial yang lebih komprehensif dan terorganisir.

Untuk menguraikan dinamika dalam sistem sosial, Parsons merancang model AGIL, yaitu empat fungsi fundamental yang harus terpenuhi oleh setiap sistem sosial supaya dapat bertahan dan berkembang: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency atau pattern maintenance (L). Adaptation mengacu pada kapasitas sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar; Goal Attainment menunjuk pada pencapaian sasaran kolektif; Integration merupakan proses memelihara solidaritas dan keteraturan internal; sedangkan Latency berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai dan motivasi budaya. Model AGIL ini menjadi instrumen analisis yang penting untuk mengevaluasi bagaimana berbagai institusi dan elemen masyarakat melaksanakan peranannya dalam mendukung sistem sosial.

Dalam konteks studi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU, khususnya di Kebumen, model AGIL dapat dimanfaatkan untuk memahami bagaimana sistem sosial mendorong partisipasi politik masyarakat. Sebagai contoh, fungsi Adaptation terlihat dari strategi KPU dalam mengadaptasi metode sosialisasi sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal; Goal Attainment terefleksi dalam usaha mencapai peningkatan partisipasi pemilih; Integration tampak pada kolaborasi antara KPU, tokoh masyarakat, dan pemilih dalam menjaga keterlibatan sosial-politik; sementara Latency berperan melalui pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kesadaran kewarganegaraan. Dengan menggunakan kerangka AGIL, analisis terhadap strategi KPU menjadi lebih sistematis dan terarah (Ritzer, 2004).

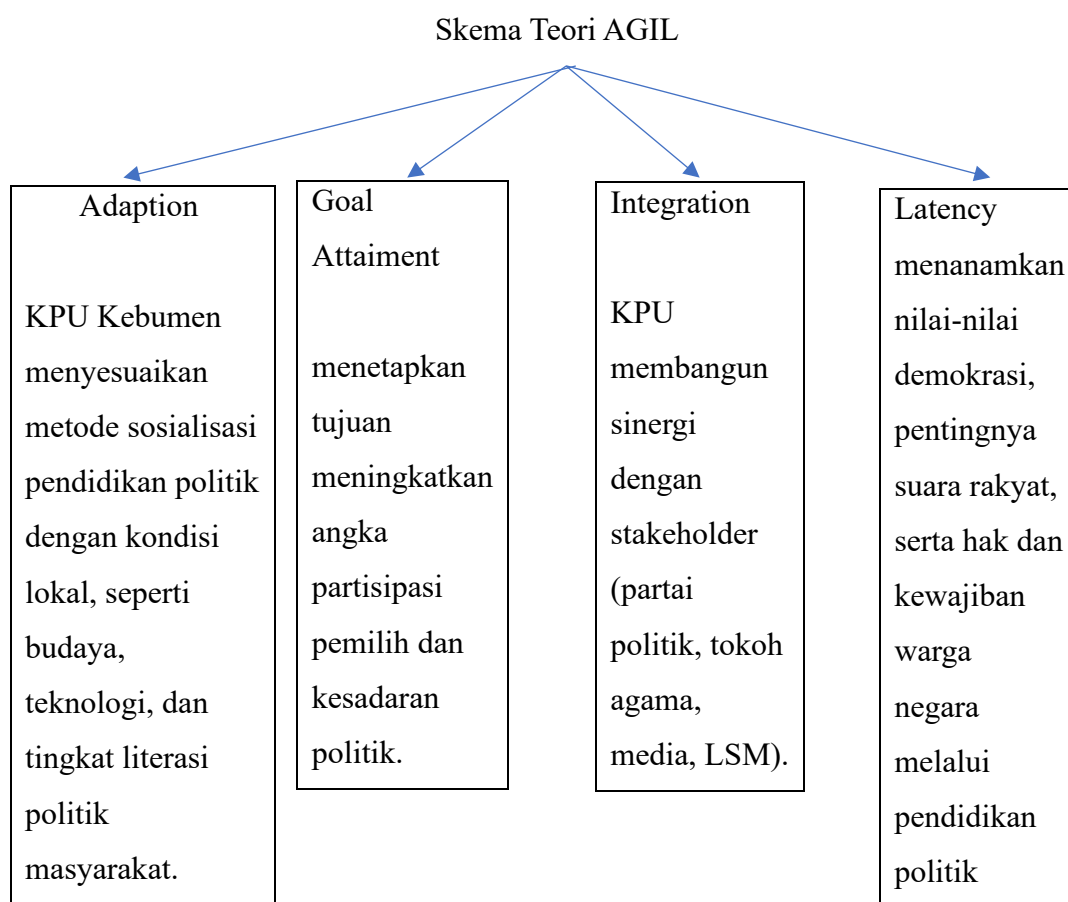
1. Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menekankan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama agar dapat bertahan dan berkembang secara stabil. Keempat fungsi tersebut dirangkum dalam skema AGIL: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L). Dalam konteks strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kebumen 2024, skema AGIL dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana KPU menjalankan perannya dalam sistem sosial.

- a. Adaptation (A): Fungsi adaptasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks KPU, adaptasi tercermin dalam upaya menyesuaikan strategi pendidikan politik dengan karakteristik masyarakat Kebumen, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan budaya lokal. Misalnya, KPU dapat menggunakan media sosial, diskusi kelompok, dan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Parsons bahwa sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk mempertahankan stabilitasnya .
- b. Goal Attainment (G): Fungsi pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menetapkan dan mencapai tujuan kolektif. KPU memiliki tujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Untuk mencapai tujuan ini, KPU perlu merancang program pendidikan politik yang efektif, menetapkan indikator keberhasilan, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Parsons menekankan pentingnya sistem dalam menetapkan tujuan yang jelas dan mengarahkan tindakan kolektif untuk mencapainya .
- c. Integration (I): Fungsi integrasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menjaga kohesi dan koordinasi antar komponennya. KPU perlu membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk memastikan pesan pendidikan politik tersampaikan secara konsisten. Selain itu, KPU harus memastikan bahwa aturan dan norma yang mengatur proses pemilu dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak. Parsons menekankan bahwa integrasi sosial penting untuk menjaga stabilitas sistem .
- d. Latency (L): Fungsi pemeliharaan pola berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai dan motivasi budaya yang mendukung keberlanjutan sistem. KPU berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas, melalui program pendidikan politik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pemilu secara teknis, tetapi juga memahami makna dan pentingnya partisipasi politik. Parsons menyatakan bahwa pemeliharaan pola penting untuk memastikan motivasi individu sesuai dengan nilai-nilai sistem sosial .

Dengan menerapkan skema AGIL, strategi pendidikan politik KPU dapat dianalisis secara komprehensif, mencakup aspek adaptasi terhadap lingkungan, pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan pelestarian nilai-nilai demokrasi. Pendekatan ini membantu memahami peran KPU

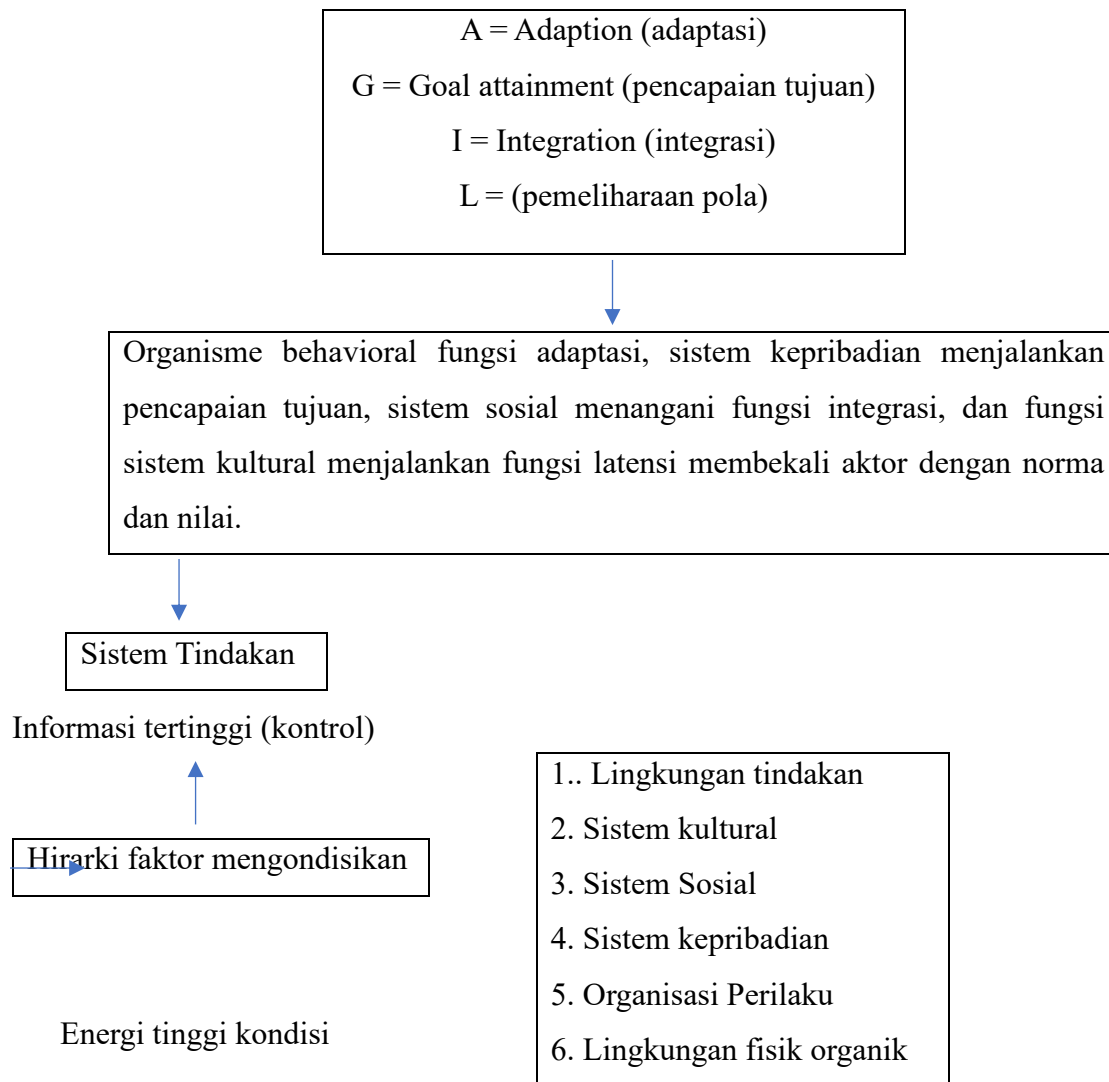
dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem demokrasi lokal. Maka dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam satu Masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep di atas yang disingkat menjadi AGIL. Berikut bentuk pola Gambaran konsep AGIL dalam Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024:



Gambar 1 Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons

Pola pikir Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons





Gambar 2 Pola pikir Teori Struktural

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

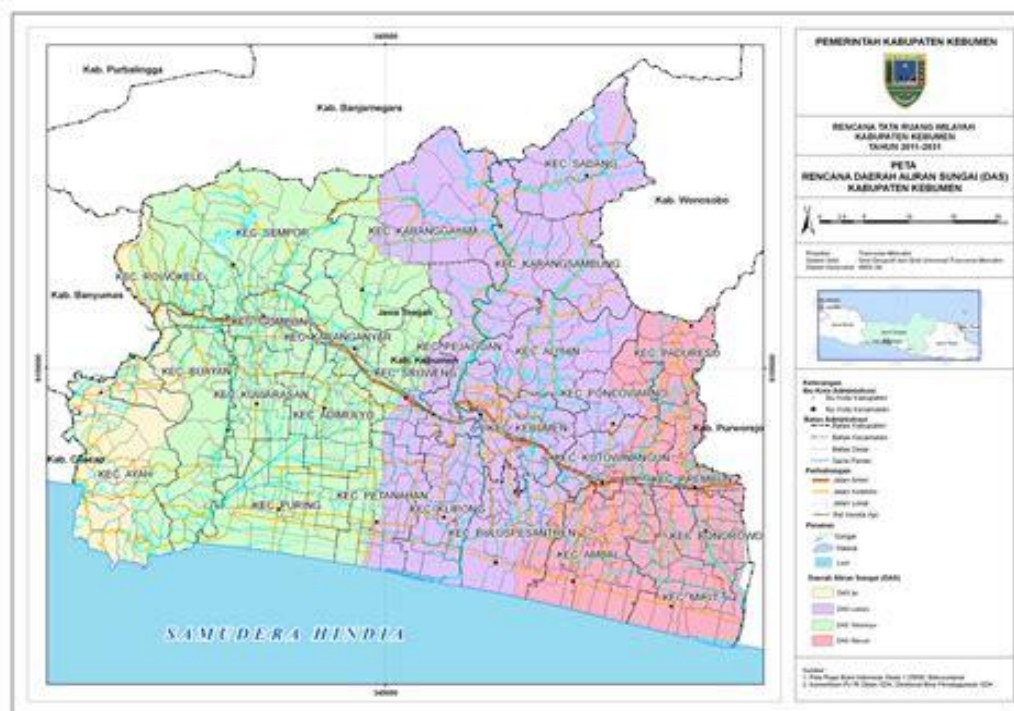
1. Letak Geografi dan Luas Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Secara astronomis, kabupaten ini berada antara 7°27' hingga 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' hingga 109°50' Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 1.281,12 km², dengan batas-batas administratif meliputi Kabupaten Banjarnegara di utara, Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di barat, serta Samudra Hindia di Selatan (Kebumen P. , 2018). Daerah ini terkenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, mencakup area pesisir selatan, kawasan perbukitan kapur, serta area persawahan yang produktif. Pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Kebumen berlokasi di Kota Kebumen. Daerah ini juga mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dan kebudayaan yang unik, menjadikannya sebagai salah satu wilayah signifikan di bagian selatan Jawa Tengah.

Luas area Kabupaten Kebumen mencapai sekitar 1.281,115 km². Secara administratif, wilayah ini dibagi menjadi 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa. Kecamatan dengan area terluas adalah Kecamatan Karangsambung, yang juga menjadi lokasi penelitian geologi nasional karena kekayaan batuan kuno yang dimilikinya. Kebumen juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 57,5 kilometer yang membentang dari barat ke timur. Batas area Kabupaten Kebumen meliputi sebelah utara bersebelahan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, sebelah timur bersebelahan dengan Kabupaten Purworejo, sebelah selatan bersebelahan langsung dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Cilacap. Posisi ini memberikan Kebumen potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata bahari.

Bentuk permukaan tanah wilayah Kabupaten Kebumen cukup beragam, meliputi dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan area pantai, sementara bagian utara terdiri dari perbukitan kapur Pegunungan Serayu Selatan. Wilayah tengah merupakan daerah pertanian subur yang digunakan untuk budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura. Kondisi geografis dan iklim yang mendukung menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai daerah yang potensial untuk pertanian. Komoditas utama meliputi padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lahan pertanian tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Gombang, Kuwarasan, Adimulyo, dan lainnya (Lesmana, 2020).

Gambar 3 Peta Kabupaten Kebumen



Sumber: satudata.kebumenkab.co.id

Gambar 1 adalah Peta Kabupaten Kebumen yang menunjukkan Kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor serta Sruweng adalah 26 Kecaamatan yang membentuk Kabupaten Kebumen.

2. Data Kependudukan Kabupaten Kebumen

Menurut statistik dari Kabupaten Kebumen, dengan jumlah populasi 717.127 laki-laki dan 697.627 perempuan dalam populasi tahun 2024. Faktor utama yang memengaruhi jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 dapat dianalisis dari beberapa aspek demografis dan sosial ekonomi. Pertumbuhan alami merupakan kontributor utama peningkatan jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun), yaitu sekitar 68,49% dari total penduduk.

Tabel 2 Data Penduduk Kab. Kebumen Tahun 2024

Wilayah Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Ayah	34.103	33.228	67.331

Buayan	35.171	33.518	68.689
Puring	33.659	33.032	66.691
Petanahan	31.191	31.045	62.236
Klirong	33.720	33.015	66.735
Buluspesantren	30.754	29.447	60.201
Ambal	32.716	31.694	64.410
Mirit	27.434	26.946	54.380
Bonorowo	11.034	10.784	21.818
Prembun	14.564	14.568	29.132
Padureso	8.870	8.690	17.560
Kutowinangun	25.226	24.159	49.385
Alian	36.028	34.400	70.428
Poncowarno	9.818	9.460	19.278
Kebumen	68.394	66.980	135.374
Pejagoan	29.278	28.065	57.343
Sruweng	32.054	31.338	63.392
Adimulyo	18.930	19.175	38.105
Kuwarasan	26.723	25.656	52.379
Rowokele	26.946	26.414	53.360
Sempor	36.420	34.959	71.379
Gombong	25.388	25.562	50.950
Karanganyar	19.387	18.938	38.325
Karanggayam	31.417	30.288	61.705
Sadang	12.351	11.613	23.964
Karangsambung	25.551	24.653	50.204
Kab. Kebumen	717.127	697.627	1.414.754

Sumber: Badan Pusat Statistik Kebumen

3. Tingkat Pendidikan Kabupaten Kebumen

Tingkat pendidikan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 menunjukkan tantangan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Dari total populasi sekitar 1,45 juta jiwa, sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah. Sebanyak 30,4% penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), sementara 16,76% tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi dan berdampak pada kualitas tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun demikian, terdapat indikasi peningkatan partisipasi pendidikan di jenjang menengah. Sebanyak 20,61% penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 19,61% hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi masih rendah, yaitu hanya 4,31%. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan tinggi di daerah, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD/Sederajat	120.190
2	Tamat SD/Sederajat	439.870
3	Tamat SLTP	283.690
4	Tamat SLTA	298.170
5	Tamat Akademi, S1,S2,,S3	62.408
	Total	1.204.328

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), 2024

4. Kesehatan

Pada tahun 2024, sektor kesehatan di Kabupaten Kebumen menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai program, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan deteksi dini dan tatalaksana penyakit seperti tuberkulosis, serta penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah.

Distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di berbagai kecamatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan tersebar di seluruh kecamatan, dengan variasi jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui berbagai program pelatihan dan rekrutmen. Selain itu, pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, juga menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di daerah.

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pembentukan KPU tidak terlepas dari tuntutan reformasi 1998 yang menghendaki pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan adil. KPU pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, dan sejak itu mengalami perkembangan dari segi kewenangan, struktur, serta peran strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia (Mahfud MD, 2010). Secara yuridis, keberadaan KPU dijamin dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan regulasi ini, KPU memiliki posisi sebagai penyelenggara pemilu bersama Bawaslu dan DKPP (Undang-Undang Nomor 7, 2017).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan mandat dari KPU Republik Indonesia. Sebagai bagian dari struktur KPU secara nasional, KPU Kebumen memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah Kabupaten Kebumen. Kelembagaan ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017). KPU Kabupaten Kebumen dibentuk sesuai ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kebumen dipimpin oleh lima orang komisioner yang berasal dari berbagai latar belakang, yang telah melalui proses seleksi secara terbuka dan ditetapkan oleh KPU RI. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kebumen didukung oleh Sekretariat KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari beberapa subbagian, seperti Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum, dan Partisipasi Masyarakat (KPU Kebumen, 2023)

Secara geografis, wilayah kerja KPU Kabupaten Kebumen mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen yang berjumlah 26 kecamatan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikelola KPU Kebumen pada Pemilu terakhir (2024) mencapai lebih dari 4.000 TPS, dengan jutaan surat suara yang harus dicetak, distribusikan, dan dikelola sesuai prosedur. Dalam konteks ini, KPU Kebumen dituntut memiliki sistem logistik dan administrasi yang rapi serta kemampuan koordinasi yang kuat dengan penyelenggara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (KPU Kebumen, 2024).

Selain fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Kebumen juga berperan aktif dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti sosialisasi ke sekolah dan kampus, komunitas pemuda, organisasi masyarakat, dan kelompok rentan. KPU Kebumen juga menjalankan program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang menjadi pusat informasi dan edukasi demokrasi di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan misi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kebumen berupaya menjaga prinsip netralitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. KPU juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai di Kebumen. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil, serta peningkatan kesadaran politik warga, terutama di kalangan pemilih muda dan pemilih pemula (KPU Kebumen, 2024).

KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, untuk mendukung demokrasi yang berkualitas dan kedaulatan rakyat. Dalam mencapai visinya, KPU mengusung misi meningkatkan kualitas tahapan pemilu, memperkuat kelembagaan, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi pemilih secara

aktif dan rasional (KPU RI. , 2023). Struktur kelembagaan KPU terdiri dari KPU RI di tingkat pusat, KPU Provinsi di tingkat provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di tingkat daerah. Masing-masing tingkatan KPU memiliki tugas yang sesuai dengan cakupan wilayahnya, namun bekerja secara terkoordinasi dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil (Undang-Undang Nomor 7, 2017).

Adapun tugas utama KPU meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab dalam memastikan hak pilih warga negara terlindungi, serta menyediakan informasi yang transparan kepada publik. Dalam menjalankan tugasnya, KPU menjunjung prinsip jujur, adil, bebas, rahasia, langsung, umum, serta akuntabel (Fitriyah R. , 2019). Sebelum terbentuknya KPU, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri. Namun, model ini dianggap kurang independen karena adanya campur tangan pemerintah dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pembentukan KPU sebagai lembaga independen menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. KPU mengalami beberapa perubahan struktur dan keanggotaan sejak pertama kali dibentuk. Pada tahun 2001, melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, KPU dibentuk kembali dengan 11 anggota yang berasal dari kalangan akademisi dan LSM. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa anggota KPU harus berasal dari kalangan independen dan non-partisan, serta memiliki integritas dan kapasitas yang memadai dalam bidang kepegiluan. alam menjalankan tugasnya, KPU memiliki wewenang untuk merencanakan dan menyelenggarakan pemilu, menetapkan hasil pemilu, serta mengatur tahapan dan jadwal pemilu. KPU juga bertanggung jawab dalam menetapkan partai politik peserta pemilu dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu.

KPU berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi angka golput dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga pemilu dapat berjalan dengan partisipasi yang tinggi dan representatif. KPU juga bertanggung jawab dalam mengelola data pemilih melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengelolaan DPT yang akurat dan

mutakhir sangat penting untuk menjamin hak pilih setiap warga negara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. KPU terus berupaya meningkatkan kualitas DPT melalui pemutakhiran data secara berkala.

KPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Struktur ini memungkinkan KPU untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menyelenggarakan pemilu secara serentak dan efisien. Setiap tingkatan KPU memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan tingkatannya. KPU juga berperan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan bagian dari proses demokratisasi di tingkat lokal, dan KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. KPU juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota . Adapun tugas, wewenang, serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Melaksanakan semua tahapan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Menerima dan memverifikasi dukungan calon perseorangan anggota DPD serta calon kepala daerah.
- 4) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.
- 5) Melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih tetap (DPT).
- 6) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan.
- 7) Mengelola logistik pemilu di wilayahnya.
- 8) Melantik dan memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- 9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada KPU Provinsi.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Menetapkan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih.
- 3) Memberhentikan sementara atau tetap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang melanggar kode etik atau peraturan.
- 4) Mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 5) Mengakses data kependudukan dari instansi terkait untuk keperluan pemutakhiran data pemilih.

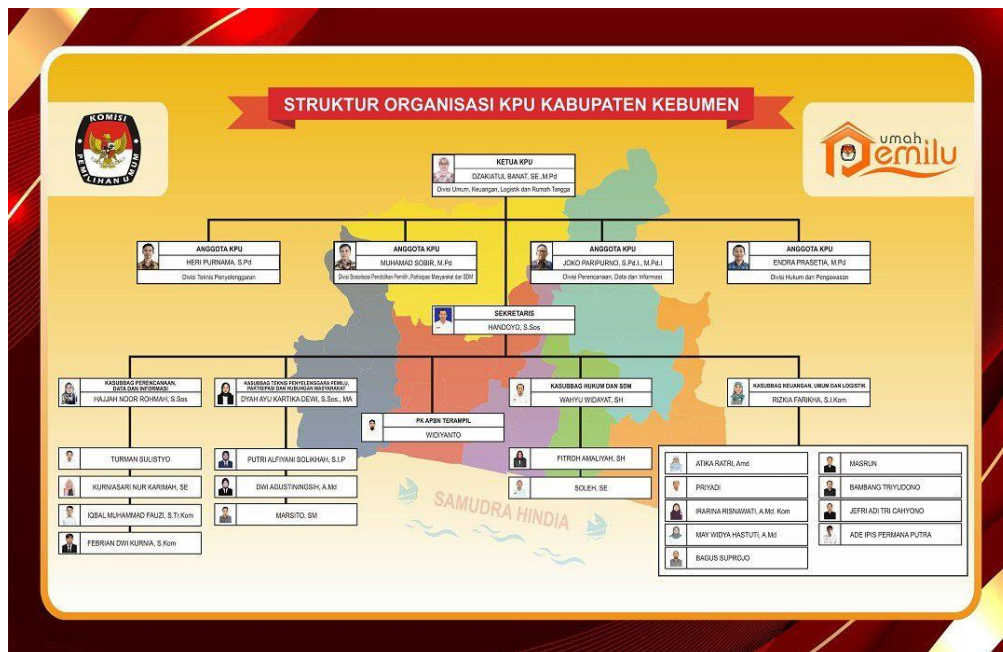
c. Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi dalam menyelenggarakan pemilu.

- 2) Menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) dalam penyelenggaraan pemilu.
- 3) Memberikan pelayanan yang setara kepada peserta pemilu dan pemilih.
- 4) Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu secara terbuka kepada publik.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 6) Menjalinkan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, Bawaslu, TNI/Polri, dan masyarakat.

4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Gambar 4 Struktur Organisasi Komisioner



Sumber: Website KPU Kebumen

Komisioner KPU Kabupaten Kebumen

Divisi Keuangan, Umum Logistik & Rumah Tangga	:	Dzakiatul Banat, SE.,M.Pd (Ketua)
Divisi Teknis Penyelenggara	:	Heri Purnama, S.Pd (Anggota)
Divisi Sosdiklih Parmas	:	Muhamad Sobir, M.Pd (Anggota)
Divisi Perencanaan, Data & Informasi (Anggota)	:	Joko Paripurno, S.Pd.I., M.Pd.I
Sekretaris	:	Handoyo, S.Sos (Anggota)

Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi : Hajjah Noor Rohmah, S.Sos
(Anggota)

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas : Dyah Ayu Kartika Dewi, S.Sos,
M.A (Anggota)

PK APBN Terampil : Widiyanto (Anggota)

Kasubbag Hukum dan SDM : Wahyu Hidayat, S.H (Anggota)

Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik : Rizkia Farikha, S.I.Kom (Anggota)

5. Data Pemilih Tetap Pilkada 2024

Jumlah pemilih tetap untuk Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2024 tersebar di 26 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki puluhan hingga ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Kebumen. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kebumen 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Daftar Pemilih		
				L	P	Jml
1	ADIMULYO	23	64	14.783	15.133	29.916
2	ALIAN	16	105	26.759	25.893	52.652
3	AMBAL	32	103	25.329	24.488	49.817
4	AYAH	18	107	25.758	25.634	51.392
5	BONOROWO	11	36	8.487	8.325	16.812
6	BUAYAN	20	100	26.379	25.902	52.281
7	BULUSPESANTREN	21	92	23.632	23.012	46.644
8	GOMBONG	14	74	19.020	19.688	38.708
9	KARANGANYAR	11	62	14.807	14.838	29.645
10	KARANGGAYAM	19	102	24.102	22.955	47.057
11	KARANGSAMBUNG	14	80	19.180	18.543	37.723
12	KEBUMEN	29	196	51.357	50.791	102.148
13	KLIRONG	24	100	25.447	25.115	50.562
14	KUTOWINANGUN	19	78	18.989	18.749	37.738
15	KUWARASAN	22	85	20.339	19.807	40.146
16	MIRIT	22	84	21.093	20.560	41.653

17	PADURESO	9	30	6.466	6.390	12.856
18	PEJAGOAN	13	81	21.651	21.082	42.733
19	PETANAHAN	21	95	24.031	23.755	47.786
20	PONCOWARNO	11	34	7.314	7.187	14.501
21	PREMBUN	13	48	11.349	11.474	22.823
22	PURING	23	99	25.572	25.173	50.745
23	ROWOKELE	11	82	20.213	19.862	40.075
24	SADANG	7	40	9.377	8.768	18.145
25	SEMPOR	16	111	27.584	27.210	54.794
26	SRUWENG	21	99	24.054	23.893	47.947
TOTAL		460	2.187	543.072	534.227	1.077.299

Sumber: KPU Kebumen

Jumlah TPS, jumlah pemilih laki-laki, jumlah pemilih Perempuan, serta jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan seluruhnya tercantum pada table statistik pemilih tetap Pilkada Kebumen 2024 di atas. Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 Kecamatan, total TPS di Kabupaten Kebumen berjumlah 2.187 jika diikutsertakan pada 26 Kecamatan. Pemilih laki-laki di Kabupaten Kebumen berjumlah 543.072 orang. Pemilih Perempuan di Kabupaten Kebumen berjumlah 534.227 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih di Kabupaten Kebumen adalah 1.077.299 jika dijumlahkan dengan jumlah suara laki-laki dan Perempuan. Kecamatan Kebumen yang memiliki jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 102.148 orang, merupakan kecamatan dengan pemilih terbanyak yang masuk dalam data pemilih tetap Pilkada 2024. Kecamatan Padureso yang memiliki 30 TPS dan total 12.856 pemilih merupakan kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit yang masuk dalam data pemilih tetap Pilkada Kebumen 2024.

BAB IV

STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024

Bab ini menyajikan data dan analisis temuan di lapangan mengenai strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kebumen 2024. Dalam bab ini juga dijelaskan berbagai program strategis yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk mendorong partisipasi politik dalam Pilkada tersebut. Analisis yang disajikan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan metode wawancara serta studi literatur dan dokumen pendukung. Selanjutnya, bab ini menguraikan analisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori Struktur Fungsional Talcott Parsons untuk mengkaji strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2024.

A. Strategi Pendidikan Politik Secara Langsung

Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran politik serta peran sebagai warga negara. Melalui pendidikan politik, individu dibentuk agar memahami hak dan kewajibannya dalam ranah politik, sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam sistem demokrasi (Prayitno, 2022). Pendidikan politik secara langsung memiliki keunggulan utama dibandingkan metode lain karena memungkinkan adanya interaksi tatap muka yang nyata antara penyelenggara dan peserta. Melalui interaksi ini, materi dapat disampaikan secara lebih komunikatif dan responsif terhadap pertanyaan atau kebingungan yang muncul dari peserta, sehingga transfer pengalaman dari narasumber ke peserta menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Suasana belajar yang tercipta pun lebih dinamis dan personal, sesuatu yang sulit dicapai melalui media digital atau cetak.

Selain itu, pendidikan langsung mampu membangun ikatan emosional dan hubungan personal yang lebih kuat antara penyelenggara dan peserta. Keterlibatan emosional ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya dan keterikatan terhadap proses demokrasi, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Ketika peserta merasa dihargai secara personal, mereka lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab. Ikatan personal tersebut juga memperkuat komitmen peserta untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai demokrasi ke lingkungan sosialnya, sehingga dampak pendidikan politik menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

Fungsi adaptasi (Adaption) dalam konteks ini menggambarkan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen secara dinamis menyesuaikan strategi pendidikan politiknya dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat serta kemajuan teknologi informasi. Dalam menghadapi masyarakat yang semakin heterogen dan perkembangan

teknologi yang pesat, KPU Kebumen tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dan relevan. Adaptasi ini penting agar pesan-pesan politik dapat tersampaikan secara efektif, meningkatkan partisipasi pemilih, dan membangun kesadaran politik yang lebih luas. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat saat ini, KPU mampu memformulasikan strategi yang tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan teknologi.

1. KPU Goes to School

KPU Kebumen menerapkan program KPU Goes to School/Kegiatan Pendidikan Pemilih sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai tujuan pendidikan politik Pilkada 2024, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula. Program ini menargetkan siswa SMA dan SMK sederajat yang baru memasuki usia pemilih agar mereka memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang proses demokrasi dan pentingnya hak pilih. Dengan memberikan pendidikan politik secara langsung di sekolah-sekolah, KPU berharap dapat membentuk generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak pilihnya pada Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Pelaksanaan KPU Goes to School dilakukan dengan mengunjungi sejumlah sekolah di wilayah Kebumen, seperti SMP N 2 Prembun, SMA N 1 Petanahan, MAN 3 Kebumen, SMA N Pejagoan, SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMA N 1 Kebumen, SMK Tamtama Karanganyar dan masih banyak lagi. Setiap sesi sosialisasi diikuti oleh sekitar 100 siswa yang diberikan materi mengenai pengertian pemilu, tujuan demokrasi, tata cara memilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses Pilkada. Materi ini disampaikan dengan metode interaktif, seperti diskusi dan simulasi pemungutan suara, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh secara praktis.

“Kegiatan KPU Goes to School merupakan bagian strategis kita dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di tingkat SMA/SMK sederajat menjelang Pilkada 2024. Program kita ini bertujuan menanamkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hak pilih, proses pemilihan, serta peran aktif generasi muda dalam demokrasi. Melalui pendekatan interaktif dan edukatif, seperti diskusi, simulasi pemungutan suara, dan kuis, kita berharap para siswa dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas, sehingga dapat menolak praktik politik

uang dan golput. (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membangun sikap dan nilai-nilai demokrasi dalam diri siswa. KPU mengajarkan pentingnya menghormati pilihan orang lain, kejujuran dalam berpolitik, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Dengan demikian, KPU Goes to School berkontribusi pada pembentukan karakter pemilih yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika dan berintegritas dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan politik melalui program ini juga menjadi sarana untuk menjawab tantangan rendahnya partisipasi pemilih muda yang selama ini menjadi perhatian KPU secara nasional. Berdasarkan data KPU RI, partisipasi pemilih muda di beberapa daerah masih di bawah rata-rata nasional, sehingga program ini menjadi terobosan penting untuk mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan yang lebih dekat dan personal kepada pemilih pemula.

Selain fokus pada SMA/SMK, KPU Kebumen juga mengembangkan program serupa di tingkat perguruan tinggi melalui KPU Goes to Campus. Kegiatan ini menargetkan mahasiswa sebagai bagian dari pemilih muda yang kritis dan potensial dalam menentukan arah politik daerah. Dengan menggabungkan kedua program ini, KPU Kebumen berusaha menjangkau seluruh spektrum pemilih muda dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, memperkuat fondasi partisipasi pemilih generasi Z dan milenial. Dalam pelaksanaannya, KPU Kebumen melakukan koordinasi intensif dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk memastikan kelancaran program. Dukungan dari kepala sekolah dan guru sangat penting agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, KPU juga menyediakan materi edukasi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan karakteristik peserta didik, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima.

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian integral dari program Goes to School. KPU melakukan pengukuran efektivitas melalui survei dan feedback langsung dari peserta serta pihak sekolah. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode penyampaian dan materi sosialisasi agar lebih relevan dan menarik bagi pemilih pemula. Dengan cara ini, KPU memastikan bahwa tujuan peningkatan partisipasi pemilih muda dapat tercapai secara optimal. Dokumentasi kegiatan KPU Goes to School dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari laporan resmi KPU Kebumen, foto dan video kegiatan yang diunggah di media sosial resmi KPU Kebumen (@kpukebumen), hingga publikasi di website resmi KPU Kebumen.

Gambar 5 Sosialisasi Goes To School



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Keberhasilan program ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Kepala Sekolah SMK Wongsorejo, misalnya, menyatakan bahwa program Goes to School memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik. Banyak siswa yang sebelumnya kurang tertarik dengan isu politik menjadi lebih aktif dan kritis setelah mengikuti sosialisasi ini. Secara keseluruhan, KPU Goes to School merupakan strategi efektif yang menunjukkan komitmen KPU Kebumen dalam mencapai tujuan sosialisasi politik Pilkada 2024, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula. Dengan pendekatan edukatif, interaktif, dan adaptif terhadap karakter generasi muda, program ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

2. KPU Goes To Campus

KPU Goes to Campus adalah sebuah inisiatif strategis yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen dengan tujuan utama meningkatkan pendidikan

politik, khususnya bagi kalangan pemilih pemula yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses demokrasi, hak serta kewajiban sebagai pemilih, sekaligus menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Melalui pendekatan langsung dengan mengunjungi berbagai kampus di Kebumen, KPU berusaha menumbuhkan kesadaran politik yang kuat di kalangan generasi muda, yang merupakan calon pemilih masa depan dan pilar penting dalam kelangsungan demokrasi lokal.

Pendidikan politik yang diberikan dalam program Goes to Campus tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, melainkan juga mengedepankan dialog interaktif dan diskusi yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta aktif. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak sekadar memahami secara permukaan, tetapi mampu mengerti secara mendalam tentang fungsi partai politik, mekanisme pemilu, serta pentingnya memilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak menjadi pemilih pasif saja, melainkan juga mampu berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Selain menyusuri Sekolah, kami juga menyusuri Kampus di Kebumen, kami aktif melaksanakan berbagai program edukasi politik. Salah satu kegiatan rutin yang digelar adalah talkshow "KPU Kebumen Menyapa" yang menghadirkan narasumber dari partai politik serta penyelenggara pemilu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses demokrasi dan pentingnya keterlibatan pemilih muda. Selain itu, KPU Kebumen juga mengadakan sosialisasi yang inklusif dengan menyediakan fasilitas seperti penerjemah bahasa isyarat bagi masyarakat difabel, guna memastikan akses pendidikan politik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Melalui strategi ini, kita KPU Kebumen berharap dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemilih pemula secara efektif dalam Pilkada 2024, sekaligus membangun budaya politik yang sehat dan menolak praktik politik uang di kalangan generasi muda kampus.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Dalam pelaksanaannya, KPU Kebumen memanfaatkan berbagai media dan metode komunikasi modern, termasuk penyelenggaraan talkshow yang disiarkan secara digital melalui

platform YouTube dengan judul "KPU Kebumen Menyapa." Talkshow ini berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif untuk menjangkau mahasiswa dan masyarakat luas, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan seperti anggota KPU, akademisi, dan tokoh partai politik. Program ini dilaksanakan secara rutin dan mengangkat tema-tema penting terkait pemilu dan dinamika politik lokal, sehingga mampu memberikan wawasan yang komprehensif kepada penonton.

Selain menyasar mahasiswa, KPU Kebumen juga mengintegrasikan program Goes to Campus dengan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat khusus, seperti sosialisasi peran masyarakat difabel dalam Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan komitmen kuat KPU dalam menjunjung prinsip inklusivitas, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula di kampus, memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan politik. Dalam kegiatan tersebut, KPU menyediakan fasilitator khusus, seperti juru bahasa isyarat, untuk mempermudah pemahaman peserta tuna rungu sehingga mereka juga dapat mengikuti sosialisasi dengan optimal.

Menyadari karakter generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial dan platform digital, KPU Kebumen mengembangkan konten edukasi yang menarik dan mudah diakses melalui berbagai kanal media sosial. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar politik secara fleksibel dan interaktif, sesuai dengan gaya hidup dan preferensi mereka. Dengan cara ini, pendidikan politik menjadi lebih relevan dan menyenangkan bagi generasi muda, sehingga meningkatkan minat dan partisipasi mereka. Peningkatan partisipasi politik khususnya dari pemilih pemula di Kebumen melalui program Goes to Campus sangat penting mengingat Pilkada 2024 merupakan momentum strategis untuk memperkuat demokrasi lokal. Dengan adanya pemilih pemula yang berpengetahuan luas dan kritis, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung secara lebih demokratis, transparan, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah.

KPU Kebumen juga menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan partai politik, untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan politik ini. Sinergi tersebut memperkuat efektivitas penyampaian materi dan memperluas jangkauan sosialisasi, sehingga mahasiswa memperoleh informasi yang berimbang dan komprehensif mengenai proses demokrasi dan Pilkada. Kolaborasi ini juga memperkuat legitimasi program serta memperkaya perspektif yang disampaikan kepada peserta.

Gambar 6 Sosialisasi Goes to Campus



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Dalam konteks Pilkada 2024, KPU Kebumen menegaskan pentingnya prinsip pemilihan yang "Luber dan Jurdil" (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula di kampus juga menekankan nilai-nilai integritas pemilu dan mengajak mahasiswa untuk menghindari praktik-praktik negatif seperti politik uang atau polarisasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan KPU Goes to Campus dan program pendidikan politik lainnya terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses melalui kanal resmi KPU Kebumen, seperti website dan saluran YouTube. Salah satu dokumentasi penting adalah talkshow "KPU Kebumen Menyapa," yang secara rutin membahas berbagai isu kepemiluan dan pendidikan politik, memberikan gambaran nyata tentang upaya KPU dalam meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih pemula.

Secara keseluruhan, program KPU Goes to Campus di Kebumen merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta karakteristik pemilih muda, KPU Kebumen memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan pemilih pemula yang sadar demokrasi dan siap menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab pada Pilkada 2024. Program ini tidak hanya memperkuat kualitas demokrasi lokal, tetapi juga menumbuhkan semangat keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan politik di masa depan.

3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Disabilitas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik, khususnya bagi para

pemilih penyandang disabilitas, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Salah satu kegiatan utama yang digelar adalah sosialisasi mengenai peran masyarakat difabel dalam pemilihan gubernur dan bupati, yang berlangsung pada tanggal 15 November 2024 di Hotel Mexolie Kebumen. Acara ini dirancang untuk mendorong peningkatan partisipasi politik dari kalangan penyandang disabilitas agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal dan tanpa hambatan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, KPU Kebumen memberikan perhatian khusus dengan menyediakan fasilitas pendukung, seperti juru bahasa isyarat, guna membantu peserta tuna rungu dalam memahami materi yang disampaikan. Langkah ini mencerminkan komitmen KPU untuk menyediakan aksesibilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas sensorik. Hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa penyampaian informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta, tanpa terkecuali.

Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini berasal dari berbagai komunitas disabilitas yang ada di Kebumen, antara lain Rumah Inklusif Kebumen, Bina Akses Kebumen, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Sahabat Disabilitas Kebumen (SDK), serta beberapa organisasi lainnya yang mewakili beragam jenis disabilitas. Keterlibatan komunitas-komunitas ini sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh selama sosialisasi dapat diteruskan secara efektif kepada anggota komunitas masing-masing, sehingga jangkauan edukasi politik dapat meluas dan berdampak positif.

Muhamad Sobir, anggota KPU Kebumen yang juga bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut, menjelaskan dengan rinci tentang asas-asas pemilihan Pilkada 2024 yang dikenal dengan prinsip Luber Jurdil, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Selain itu, ia memaparkan prosedur pemilihan yang berlaku agar para pemilih penyandang disabilitas memahami tata cara pemungutan suara dan dapat berpartisipasi dengan penuh keyakinan. Sobir juga mengingatkan para peserta untuk memeriksa status mereka sebagai pemilih melalui situs resmi KPU di <https://cekdptonline.kpu.go.id>, guna memastikan bahwa mereka terdaftar dan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa kendala saat hari pemilihan tiba. Hal ini juga sesuai dengan wawancara narasumber:

“Kita, KPU Kebumen menegaskan komitmennya memberikan layanan inklusif dan menjamin hak pilih penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dengan tujuan agar semua warga negara, termasuk

penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam Pilkada 2024. Selain itu, KPU mengimbau pemilih disabilitas untuk memeriksa status pemilih mereka melalui situs resmi KPU agar hak pilih mereka terlaksana dengan baik. Melalui sosialisasi ini, KPU Kebumen berusaha memastikan inklusivitas dan partisipasi luas dari masyarakat disabilitas serta meningkatkan kesadaran dan antusiasme mereka untuk menggunakan hak pilih secara aman dan nyaman pada 27 November 2024”. (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Selain sosialisasi, KPU Kebumen juga menjamin pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas selama proses Pilkada 2024. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak-hak mereka agar tidak mengalami diskriminasi dalam pelaksanaan pemilu. KPU telah mengakomodasi berbagai komunitas disabilitas sebagai sasaran sosialisasi dan menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk desain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas, dengan aksesibilitas fisik yang memadai serta pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan bantuan khusus. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang nyaman dan dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam rangka memperkuat pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, KPU Kebumen juga menyelenggarakan program talkshow bertema “Pemilu dalam Perspektif Disabilitas” yang menghadirkan narasumber dari berbagai organisasi disabilitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan penyandang disabilitas serta mendorong mereka agar lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Para narasumber menekankan pentingnya penyesuaian kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan klasifikasinya, serta perlunya pendamping TPS yang menguasai bahasa isyarat agar komunikasi dapat berjalan lancar. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan inklusivitas dalam setiap tahapan pemilu.

Gambar 7 Sosialisasi Peran Masyarakat Difabel



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Secara keseluruhan, KPU Kebumen memfasilitasi sebanyak 4.464 orang penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Fasilitas ini dilakukan dengan mengundang organisasi-organisasi disabilitas untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan memastikan mereka memperoleh informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Harapan dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan fasilitas ini adalah tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 serta seluruh petugas pemilu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk berperan aktif dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, dalam suasana yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Melalui berbagai upaya tersebut, KPU Kebumen menunjukkan komitmennya yang kuat untuk memastikan inklusivitas dan partisipasi luas masyarakat disabilitas dalam Pilkada 2024, sehingga setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal dan tanpa hambatan. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana penyelenggara pemilu dapat mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan demi terciptanya demokrasi yang adil dan merata.

4. Sosialisasi di Car Free Day (CFD):

Salah satu strategi adaptif yang diterapkan adalah sosialisasi di Car Free Day (CFD), di mana KPU memanfaatkan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat sebagai media penyebaran informasi politik secara langsung dan interaktif. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih santai dan terbuka untuk diskusi politik. Selain itu, KPU Kebumen juga memanfaatkan

media sosial dan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sarana komunikasi yang efektif, terutama untuk menjangkau generasi muda. Penggunaan media digital ini menunjukkan kemampuan KPU dalam mengikuti tren komunikasi modern dan memaksimalkan jangkauan informasi, sehingga pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan kedua strategi ini, KPU Kebumen berhasil mengintegrasikan pendekatan tradisional dan digital dalam upaya meningkatkan partisipasi politik di era teknologi informasi.

KPU Kebumen menerapkan strategi pendidikan politik Pilkada 2024 dengan menggelar sosialisasi di Car Free Day (CFD) yang berlangsung di Alun-Alun Pancasila Kebumen. Pemilihan CFD sebagai lokasi sosialisasi bukan tanpa alasan, karena ruang publik ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga menjadi tempat strategis untuk menyebarkan informasi politik secara langsung dan interaktif. Kegiatan ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses Pilkada, mekanisme pemungutan suara, serta pentingnya partisipasi dalam pesta demokrasi. Dengan suasana yang santai dan terbuka, sosialisasi di CFD mampu menjangkau lebih banyak orang dibandingkan metode konvensional yang bersifat formal.

“Kita menggelar Sosialisasi Pilkada 2024 dengan bentuk Car Free Day (CFD) Alun-Alun Pancasila Kebumen yang dimana strategi tersebut merupakan strategi efektif untuk menyebarkan informasi politik secara langsung dan interaktif kepada masyarakat yang memadati ruang publik tersebut. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti kuis berhadiah dan sesi tanya jawab, tetapi juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pesta demokrasi. Antusiasme warga yang tinggi selama sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menjangkau berbagai kalangan dan membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara KPU dan pemilih” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Antusiasme masyarakat yang tinggi terlihat dari padatnya pengunjung yang memadati stand-stand informasi KPU selama acara CFD. Banyak warga yang tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya tentang berbagai hal terkait Pilkada, mulai dari syarat menjadi pemilih hingga tata cara pencoblosan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi di CFD efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi mereka

dalam proses demokrasi. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kebumen, Muhamad Sobir, menyatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator positif bahwa strategi ini berhasil menjembatani komunikasi antara KPU dan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen mengadakan sosialisasi terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 pada acara Car Free Day (CFD) yang berlangsung di Alun-Alun Pancasila Kebumen pada hari Minggu, 4 Agustus 2024.

Antusiasme masyarakat Kebumen sangat tinggi dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Salah satu daya tarik utama adalah kehadiran maskot resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, yaitu "Si Lawet". Maskot yang lucu ini menjadi favorit pengunjung, terutama anak-anak, yang tampak senang berfoto bersama. Selain itu, KPU Kabupaten Kebumen juga menyediakan berbagai layanan dan aktivitas menarik lainnya, seperti pengecekan daftar pemilih secara langsung di stan KPU. Petugas dengan ramah membantu masyarakat memastikan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan mendatang. Lewat portal <https://cekdpnline.kpu.go.id> masyarakat dapat mengetahui status diri mereka sudah terdaftar menjadi daftar pemilih atau belum.

Untuk memperluas penyebaran informasi, KPU membagikan pamflet sosialisasi yang memuat informasi penting mengenai tahapan dan jadwal pemilihan. Pamflet ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses pemilihan serta pentingnya partisipasi mereka dalam demokrasi. Selain itu, KPU Kabupaten Kebumen juga menyediakan camilan jajanan pasar dan teh hangat gratis di stan mereka, yang dinikmati pengunjung sambil memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kebumen, Endra Prasetya, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah antusias mengikuti sosialisasi ini. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kebumen akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan mendorong mereka menggunakan hak pilih secara bijak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. KPU Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk terus menggelar sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan kelancaran proses pemilihan tahun 2024.

Gambar 8 Sosialisasi di Car Free Day (CFD)



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Selain aspek interaktif, sosialisasi di CFD juga memberikan kesempatan bagi KPU untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat secara langsung, termasuk mereka yang mungkin selama ini kurang terjangkau oleh media informasi resmi. Dengan bertemu langsung di ruang publik, KPU dapat menjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif, mendengar langsung aspirasi dan pertanyaan masyarakat, serta memberikan klarifikasi secara real time. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara penyelenggara Pemilu dan pemilih, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang transparan dan akuntabel.

Strategi sosialisasi di CFD juga mencerminkan kemampuan KPU Kebumen dalam beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat modern cenderung lebih menyukai informasi yang disampaikan secara langsung, interaktif, dan dengan cara yang tidak membosankan. Oleh karena itu, memanfaatkan momen CFD yang penuh dengan aktivitas sosial dan rekreasi menjadi langkah tepat untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan politik tanpa menimbulkan kesan formal dan kaku. Dengan demikian, sosialisasi di CFD bukan hanya sekadar penyebaran informasi, tetapi juga upaya membangun budaya politik yang aktif dan partisipatif di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

Secara keseluruhan, sosialisasi Pilkada 2024 di Car Free Day oleh KPU Kebumen merupakan contoh nyata penerapan strategi pendidikan politik yang adaptif dan inovatif. Melalui pemanfaatan ruang publik yang strategis, pendekatan interaktif, dan integrasi media digital, KPU berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Strategi ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membangun keterlibatan aktif warga sebagai bagian penting dalam keberhasilan Pilkada. Dengan demikian, sosialisasi di CFD menjadi model yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara pemilu lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik di era modern.

5. Pelibatan Badan Adhoc PPK & PPS

Sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Kebumen merupakan bagian penting dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada 2024. PPK dan PPS berfungsi sebagai mitra strategis KPU dalam menjalankan tahapan pemilihan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.

Sebagai mitra KPU, PPK dan PPS bertugas menyebarkan informasi mengenai tahapan Pilkada, tata cara pencoblosan, serta pentingnya menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi. Mereka melakukan sosialisasi secara langsung di tingkat kecamatan dan desa, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan masyarakat luas. Langkah ini sejalan dengan upaya KPU Kebumen dalam meningkatkan pendidikan politik agar Pilkada 2024 dapat berjalan sukses dengan partisipasi pemilih yang meningkat secara signifikan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa dalam Pilkada 2024 di Kebumen memiliki peran krusial sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen dalam mendorong kelancaran dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. PPS desa bertugas langsung di tingkat desa, sehingga menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan edukasi politik agar pemilih memahami proses serta pentingnya Pilkada 2024. KPU Kebumen telah melantik 1.380 anggota PPS yang tersebar di 449 desa dan 11 kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen. Pelantikan ini menandai kesiapan KPU dan PPS dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, termasuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kebumen serta Pilgub Jawa Tengah. Anggota PPS yang dilantik telah melalui seleksi ketat dan akan bertugas mulai Mei 2024 hingga Januari 2025.

Sebagai mitra KPU, PPS desa memiliki tugas strategis dalam sosialisasi Pilkada kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti rapat sosialisasi yang melibatkan unsur masyarakat desa seperti Karang Taruna, PKK, dan Linmas. Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi tentang tahapan Pilkada, tata cara pencoblosan, dan pentingnya partisipasi aktif pemilih. Sosialisasi oleh PPS bersifat informatif sekaligus edukatif, meningkatkan pendidikan politik masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih, mekanisme pemungutan suara, serta prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi selama Pilkada. Dengan demikian, PPS membantu KPU menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis terhadap proses politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Ya, kita lebih mengoptimalkan keberadaan penyelenggara di level kecamatan, seperti PPK/PPS dan itu kami melihat juga mereka sudah cukup proaktif sebagai kepanjangan tangan kita kepada Masyarakat. Karena untuk level kelompok-kelompok tertentu di Kawasan kota ini kan ibarat kita di KPU telah secara langsung membaur kebersamaan mereka-mereka segmen-segmen yang memang kalau kita dulu itu secara administratif itu ada relawan demokrasi yang segmen-segmen itu, nah sebenarnya kalau di tahun pilkada kemarin semuanya ya termasuk di dalam relawan, tapi tidak semua secara literatur ternamai dengan nama relawan demokrasi, tetapi untuk saat ini kita lebih mengoptimalkan PPK/PPS sebagai mitra kami” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Untuk meningkatkan pendidikan politik, KPU Kebumen mengadakan berbagai sosialisasi yang menyampaikan materi tentang fungsi pemilu sebagai sarana demokrasi, pentingnya hak suara, dan dampak pemilihan terhadap kebijakan publik. Materi tersebut disampaikan oleh anggota PPK dan PPS melalui berbagai forum, baik secara langsung maupun daring, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang Pilkada. Selain itu, PPK dan PPS juga mendokumentasikan seluruh tahapan sosialisasi dan pelaksanaan Pilkada, termasuk pengambilan sumpah/janji petugas, pengaturan TPS, dan pengelolaan daftar pemilih tetap. Dokumentasi ini penting sebagai arsip resmi dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

KPU Kebumen juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemberitahuan dan edukasi kepada pemilih. Melalui akun resmi, KPU menyebarkan informasi mengenai tahapan Pilkada, jadwal pendaftaran calon, serta cara memeriksa hak pilih secara online. Pendekatan ini efektif menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. PPK dan PPS secara aktif mengingatkan pemilih terdaftar untuk hadir ke TPS pada hari pemungutan suara. Mereka menggunakan berbagai metode, termasuk pengaturan jadwal kedatangan pemilih berdasarkan nomor urut, guna menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan. Pendekatan ini juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemilih saat memberikan suara.

Dalam sosialisasi, PPK dan PPS mengedepankan pesan persuasif yang dikemas secara kreatif, seperti penggunaan banner dan spanduk dengan warna identitas KPU (merah marun)

yang menarik perhatian. Stand foto di TPS juga disediakan untuk mengabadikan momen bersejarah saat pemilih memberikan suara, yang kemudian diharapkan dapat diunggah di media sosial sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. PPK dan PPS juga berperan sebagai penghubung antara KPU dan masyarakat desa/kelurahan. Mereka mengajak tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok lain untuk menjadi agen sosialisasi, memperluas jangkauan edukasi politik hingga ke tingkat paling bawah. Sinergi ini penting untuk memastikan informasi Pilkada tersebar merata dan mengurangi angka golput.

Gambar 9 PPK Kecamatan & PPK Desa



Sumber: Instagram PPS Desa Kaliwungu, Kebumen

Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kebumen melalui PPK dan PPS tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan anti-politik uang. Hal ini bertujuan membentuk pemilih yang tidak hanya aktif, tetapi juga berkualitas dalam memilih pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan positif. Dalam menghadapi Pilkada 2024, KPU Kebumen terus memperkuat kapasitas PPK dan PPS melalui pelatihan dan pembekalan yang sistematis. Proses ini memastikan petugas adhoc memiliki pemahaman mendalam tentang aturan pemilihan, teknik sosialisasi, dan penanganan masalah di lapangan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan efektif.

“Di tingkat desa, kami memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti oleh masyarakat, agar mereka mengerti betapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang. Kami juga berupaya menjelaskan hak dan kewajiban pemilih dengan cara yang santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, sehingga mereka tidak merasa bingung atau takut untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kami secara rutin mengadakan sosialisasi dan diskusi kecil di berbagai kelompok masyarakat, seperti ibu-ibu PKK, pemuda, dan tokoh desa,

agar pesan mengenai pentingnya Pilkada yang jujur dan adil dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama yang solid ini, partisipasi warga dalam Pilkada Kebumen nanti meningkat dan hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kami siap terus mendukung KPU dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.” (Wawancara Risbiyanto, Ketua PPS Pilkada 2024 Desa Tersobo, Kec. Prembun, Kab. Kebumen/24 Mei 2025).

KPU Kebumen juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses seleksi anggota PPK dan PPS dengan membuka pendaftaran secara terbuka. Hal ini memberikan kesempatan luas bagi warga untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan. Secara keseluruhan, sosialisasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS sebagai mitra KPU Kebumen merupakan kunci keberhasilan Pilkada 2024. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan inovatif, mereka mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, dan memastikan Pilkada berjalan lancar serta menghasilkan pemimpin yang legitimate dan dipercaya rakyat.

6. Sosialisasi Kepada Kelompok Marjinal

KPU Kabupaten Kebumen telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi pemilih, khususnya bagi kelompok marjinal yang selama ini kurang terlibat dalam proses demokrasi di wilayah Kebumen. Melalui serangkaian kegiatan sosialisasi yang terorganisir dan langsung menyasar kelompok rentan, KPU Kebumen berusaha memastikan Pilkada 2024 berlangsung dengan partisipasi yang inklusif dan representatif. Pendekatan ini penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memahami hak dan kewajibannya dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga fokus pada kelompok marjinal seperti masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, nelayan, petani, dan komunitas yang selama ini minim keterlibatan dalam politik. KPU Kebumen menggunakan berbagai metode sosialisasi, mulai dari pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, hingga pendekatan door to door yang memungkinkan interaksi lebih personal dan efektif dalam menyampaikan informasi penting terkait Pilkada 2024.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPU Kebumen juga memanfaatkan forum diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

dinas terkait, organisasi masyarakat, partai politik, dan media. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi dan memastikan pesan pendidikan politik tersampaikan secara konsisten dan menyeluruh kepada masyarakat, terutama kelompok marjinal yang sering mengalami keterbatasan akses informasi. KPU Kebumen menargetkan peningkatan partisipasi pemilih hingga 80 persen pada Pilkada 2024, sebuah target ambisius yang membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Target ini lebih tinggi dibandingkan partisipasi pada Pilkada 2020 yang mencapai sekitar 62 persen. Oleh karena itu, sosialisasi yang menasar kelompok marjinal menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.

KPU Kebumen juga memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menjangkau kelompok marjinal yang tersebar di daerah terpencil. Penggunaan media sosial, penyebaran brosur, serta kegiatan interaktif seperti karnaval dan pembagian souvenir menjadi bagian dari strategi sosialisasi yang menarik dan mudah diterima masyarakat luas. Selain itu, KPU Kebumen memberikan edukasi mengenai pentingnya memilih pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan bijaksana. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar kelompok marjinal merasa percaya diri dan termotivasi menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab. Hal ini juga sesuai dengan wawancara narasumber:

“KPU Kebumen secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada kelompok-kelompok marjinal yang terpinggirkan di wilayah Kebumen sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendidikan politik menjelang Pilkada 2024. Sosialisasi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang berpartisipasi dalam proses politik, dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih hingga mencapai 80 persen. Kita berusaha secara maksimal dari daerah Kebumen yang secara geografis sulit untuk dijangkau seperti daerah Kebumen sisi utara dan juga kita menyisiri daerah pesisir. Selain itu, KPU Kebumen juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai pilkada tersampaikan dengan baik dan mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab.”
(Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

KPU Kebumen secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas sosialisasi. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kelompok marginal telah terlibat dan memahami proses Pilkada, serta untuk memperbaiki strategi sosialisasi agar lebih optimal ke depannya. Upaya sosialisasi dan pendidikan politik ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kebumen dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Dengan melibatkan kelompok marginal secara aktif, KPU berharap Pilkada menjadi pesta demokrasi yang inklusif dan demokratis, mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kebumen.

7. Sosialisasi ke Pasar Tradisional

KPU Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi di pasar-pasar tradisional sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendidikan politik masyarakat menjelang Pilkada 2024. Pasar tradisional dipilih karena merupakan pusat aktivitas masyarakat yang beragam, sehingga sosialisasi dapat menjangkau berbagai kalangan, terutama para pedagang dan pengunjung pasar yang merupakan pemilih potensial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah serta mekanisme Pilkada yang akan berlangsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen mengadakan sosialisasi Pilkada 2024 di lima pasar tradisional di wilayah Kebumen pada hari Minggu, 8 September 2024. Kegiatan ini dilakukan oleh para komisioner KPU bersama seluruh staf sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Dzakiatul Banat, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Pilkada 2024. Lokasi sosialisasi meliputi Pasar Rakyat Pagi Kebumen, Pasar Kutowinangun, Pasar Prembun, Pasar Karanganyar, dan Pasar Gombang. Tujuan utama adalah memberikan informasi tentang proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Dalam kegiatan tersebut, tim KPU menyampaikan tahapan dan jadwal Pilkada 2024 serta mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa status daftar pemilih agar memastikan setiap warga yang berhak sudah terdaftar. Masyarakat juga diperkenalkan dengan cara mudah mengecek daftar pemilih secara daring melalui situs resmi KPU di <https://cekdpnline.kpu.go.id>. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya. Selain sosialisasi, KPU

Kabupaten Kebumen juga membagikan rompi Pilkada 2024 kepada masyarakat yang hadir di pasar, termasuk pedagang, pembeli, dan tukang becak.

Gambar 10 Sosialisasi ke Pasar Tradisional



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari banyaknya partisipasi dan perhatian selama sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan sosialisasi di pasar dianggap efektif karena langsung menyentuh masyarakat di tempat keramaian. KPU Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi secara intensif hingga hari pemilihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

*“Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kebumen kemaren itu tentunya sangat bermanfaat bagi kami selaku para pedagang dan Masyarakat di sekitar Pasar Pagi Prembun ya mas, karena kita menjadi tahu tentang tahap-tahapan dalam pilkada mendatang, kita juga terbantu dengan mengecek daftar pemilih kita apakah sudah ada di data situs website online KPU atau belum, kita itu kan ibaratnya gaptek atau kadang kalau nyoblos tu kan udah lupa tata caranya mas hahaha, jadi kita sangat terbantu oleh hal tersebut, kita menerima dengan sangat bai katas apa yang dilaksanakan oleh KPU Kebumen tersebut, karena suara rakyat itu ya sangat penting untuk keberlanjutan kedepannya”.
(Wawancara Teguh, Pedagang sekaligus Masyarakat Pasar Pagi Prembun/24 Mei 2025).*

Sosialisasi menitikberatkan pada pendidikan politik yang komprehensif, termasuk penjelasan tata cara pencoblosan, pentingnya memilih pemimpin yang tepat, dan dampak positif partisipasi aktif dalam Pilkada. Hal ini bertujuan mengurangi angka golput dan

meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. KPU juga menekankan pentingnya memilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan daerahnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait Pilkada, seperti keamanan proses pemilihan, transparansi, dan keadilan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, KPU Kebumen berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada sehingga partisipasi dapat meningkat signifikan.

Untuk memperkuat sosialisasi, KPU Kebumen mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, guna memastikan seluruh stakeholder memahami aturan kampanye dan dapat mensosialisasikan dengan benar kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendidikan politik yang efektif dan terstruktur. Pasar tradisional dipandang strategis karena menjadi tempat bertemunya berbagai elemen masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang, sehingga sosialisasi di pasar sangat efektif menjangkau masyarakat yang mungkin kurang aktif mengikuti media massa atau teknologi digital, sehingga pendidikan politik dapat merata. Hal ini sesuai dengan wawancara narasumber:

“Kita juga secara aktif menggelar sosialisasi di berbagai pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pemahaman politik menjelang Pilkada 2024. Pasar tradisional dipilih karena dianggap sebagai tempat strategis untuk menyasar masyarakat luas, termasuk para pedagang dan pengunjung yang antusias mengikuti informasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih serta cara memeriksa daftar pemilih secara daring. Melalui kegiatan ini, KPU Kebumen berharap masyarakat menjadi lebih mengerti dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada 2024, sehingga tercipta pemilihan yang demokratis dan berkualitas.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

KPU Kebumen juga menghadirkan pelayanan inklusif, seperti penyediaan TPS ramah disabilitas dalam Pilkada 2024, menunjukkan komitmen memastikan semua warga, termasuk kelompok rentan, dapat berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi. Pendekatan inklusif ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Sosialisasi di pasar tradisional juga berfungsi sebagai ajang dialog langsung dengan masyarakat, di mana KPU menerima masukan dan aspirasi dari pedagang dan pengunjung pasar yang kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Pilkada.

Pendekatan partisipatif ini memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Sosialisasi di pasar tradisional juga sejalan dengan program pemerintah daerah yang mendorong masyarakat berbelanja di pasar tradisional, seperti program “Selaras” yang diluncurkan oleh Bupati Kebumen, menciptakan sinergi antara program pemerintah dan KPU dalam memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran politik mereka. Secara keseluruhan, sosialisasi KPU Kebumen di pasar tradisional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat menjelang Pilkada 2024. Dengan pendekatan langsung, interaktif, dan inklusif, KPU berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

B. Strategi Pendidikan Politik Secara Tidak Langsung

1. Pemanfaatan Media Sosial dan Digital

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi paling efektif, terutama untuk menjangkau generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Menyadari hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen mengadopsi strategi pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai bagian dari upaya pendidikan politik dalam rangka Pilkada 2024. Langkah ini menunjukkan kemampuan adaptif KPU dalam mengikuti pola komunikasi masyarakat modern, khususnya generasi milenial dan Z yang lebih responsif terhadap konten visual dan interaktif di dunia maya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

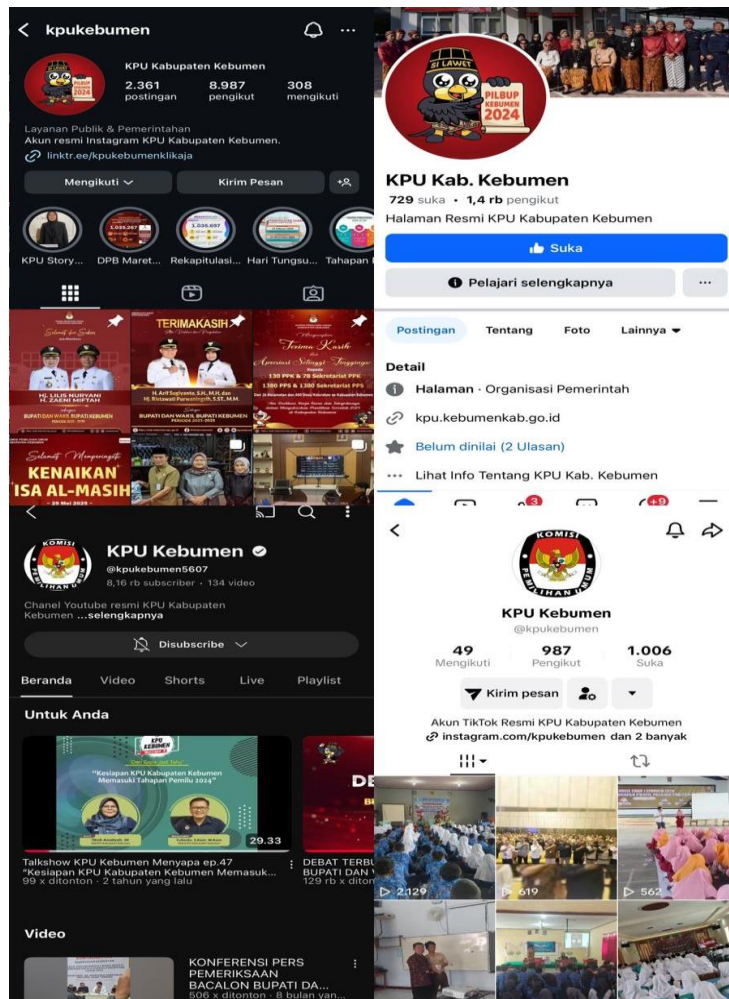
“Pemanfaatan media sosial dan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook juga merupakan bagian penting kami dari strategi pendidikan politik Pilkada 2024. Melalui media sosial, kami mampu menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih efektif dan menarik, menyajikan informasi pemilu dalam format visual dan interaktif yang sesuai dengan pola komunikasi mereka. Selain itu, interaksi langsung melalui komentar dan fitur live streaming memperkuat keterlibatan masyarakat serta membantu menangkal disinformasi. Strategi ini menunjukkan kemampuan adaptif KPU Kebumen dalam mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika sosial guna meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam proses demokrasi.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Penggunaan Instagram oleh KPU Kebumen tidak hanya sebatas mengunggah informasi resmi, tetapi juga mengemas konten edukatif yang menarik, seperti infografis, video singkat, dan cerita interaktif (Instagram Stories). Konten-konten ini dirancang agar mudah dipahami dan menarik perhatian pengguna muda yang cenderung memiliki rentang perhatian singkat. Misalnya, KPU sering membagikan tutorial singkat tentang cara menggunakan hak pilih, jadwal pemungutan suara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada. Pendekatan visual ini terbukti efektif dalam meningkatkan engagement dan penyebaran informasi secara viral.

Selain Instagram, TikTok menjadi platform utama yang dimanfaatkan KPU Kebumen untuk menjangkau audiens muda dengan cara yang lebih kreatif dan menghibur. TikTok yang identik dengan video pendek berdurasi 15-60 detik memungkinkan KPU membuat konten edukasi yang ringan namun informatif, seperti tantangan hashtag (#PilkadaKebumen2024), video animasi, dan dance challenge yang dikaitkan dengan tema demokrasi dan pemilu. Strategi ini berhasil menarik perhatian generasi muda yang biasanya kurang tertarik dengan informasi politik yang disampaikan secara formal, sehingga pendidikan politik menjadi lebih inklusif dan menyenangkan.

Facebook, meskipun dianggap lebih populer di kalangan pengguna yang lebih dewasa, tetap menjadi kanal penting bagi KPU Kebumen untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Melalui Facebook, KPU mengunggah berita terkini, pengumuman resmi, dan live streaming kegiatan sosialisasi serta debat publik calon kepala daerah. Fitur live streaming ini memungkinkan masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik tetap mendapatkan informasi secara real-time dan berinteraksi melalui kolom komentar. Dengan demikian, Facebook berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah yang memperkuat transparansi dan partisipasi publik.

Gambar 11 Akun Media Sosial KPU Kebumen



Keberhasilan pemanfaatan media sosial ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dan tim khusus yang mengelola konten digital KPU Kebumen. Tim ini terdiri dari tenaga ahli komunikasi dan teknologi informasi yang memahami karakteristik masing-masing platform dan perilaku pengguna. Mereka secara rutin melakukan evaluasi terhadap jenis konten yang paling efektif dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan tren terbaru di dunia digital. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan mampu memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan literasi politik masyarakat.

Selain konten yang menarik, KPU Kebumen juga aktif berinteraksi dengan pengguna media sosial melalui fitur komentar, direct message, dan polling online. Interaksi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara KPU dan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menjawab pertanyaan, mengklarifikasi informasi, dan menangkal hoaks yang kerap beredar selama masa pemilu. Dengan respons cepat dan transparan, KPU membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga integritas proses demokrasi di Kebumen. Dokumentasi kegiatan digital KPU Kebumen selama Pilkada 2024 dapat diakses melalui akun resmi mereka di

Instagram (@kpukebumen), TikTok (@kpukebumen), dan Facebook (KPU Kebumen). Selain itu, laporan resmi mengenai capaian sosialisasi digital ini juga dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan dan risalah kegiatan yang dapat dijadikan referensi akademik. Dokumentasi ini mencakup statistik engagement, jenis konten yang paling banyak diakses, serta feedback dari masyarakat yang menunjukkan efektivitas strategi digital KPU.

Secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial dan digital oleh KPU Kebumen mencerminkan adaptasi yang sangat diperlukan dalam konteks pendidikan politik di era modern. Dengan mengikuti pola komunikasi generasi muda yang lebih menyukai konten visual dan interaktif, KPU berhasil menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pilkada 2024. Strategi ini juga menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu lain dalam mengoptimalkan teknologi digital untuk memperkuat demokrasi. Ke depan, KPU Kebumen berencana untuk terus mengembangkan inovasi digital dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti augmented reality (AR) dan chatbot untuk memberikan pengalaman edukasi politik yang lebih personal dan interaktif. Selain itu, kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas digital juga akan diperkuat untuk memperluas jangkauan pesan politik. Dengan demikian, KPU Kebumen tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai agen perubahan yang adaptif dan progresif dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif.

Dalam konteks akademik, studi tentang pemanfaatan media sosial oleh KPU Kebumen ini dapat menjadi bahan kajian yang kaya untuk memahami dinamika komunikasi politik digital di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari strategi ini terhadap tingkat partisipasi pemilih, persepsi masyarakat terhadap demokrasi, serta efektivitas penanggulangan disinformasi.

2. Pemanfaatan Web Resmi KPU Kebumen

KPU Kebumen menerapkan strategi pendidikan politik secara tidak langsung dengan memanfaatkan platform digital, terutama website resmi KPU Kebumen, sebagai media utama untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dengan pendekatan yang modern dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Salah satu media utama yang digunakan oleh KPU Kebumen adalah web resmi mereka (<https://kab-kebumen.kpu.go.id>). Website ini menjadi pusat informasi yang menyediakan berbagai berita, pengumuman, dan materi edukasi terkait Pilkada 2024. Melalui website tersebut, KPU

menyediakan konten edukatif yang informatif dan interaktif agar masyarakat dapat lebih memahami proses pemilihan kepala daerah.

Gambar 12 Website Resmi KPU Kebumen



Sumber: kab-kebumen.kpu.go.id

Selain itu, melalui website resmi, KPU Kebumen menyiarkan talkshow rutin "KPU Kebumen Menyapa" yang membahas isu terkait pemilu dan pilkada. Dalam salah satu episodenya, Partai NasDem Kebumen menjelaskan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, menekankan pendekatan program ketimbang politik transaksional seperti politik uang. Partai NasDem juga menyalurkan bantuan sosial selama pandemi dan menghindari polarisasi politik, sejalan dengan strategi KPU dalam mendukung pendidikan politik yang berintegritas.

“Untuk Pendidikan politik secara tidak langsungnya kita sudah memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses website resmi kita mas, yaitu (<https://kab-kebumen.kpu.go.id>). Disana masyarakat bisa melihat semua informasi secara tidak langsung untuk mengetahui perkembangan updatenya. .” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

KPU Kebumen juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk memperluas jangkauan edukasi politik, misalnya menyebarkan informasi layanan pindah memilih agar masyarakat yang berpindah domisili tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Media sosial ini menjadi saluran komunikasi cepat dan efektif untuk menjaring partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal pengawasan pemilihan, KPU mengadakan sosialisasi mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan guna memberikan pemahaman tentang tata cara pengawasan yang transparan dan akuntabel, menjaga kepercayaan publik terhadap proses

demokrasi di Kebumen. Strategi pendidikan politik tidak langsung juga mencakup pemberdayaan kader dan tokoh masyarakat melalui dialog interaktif dan temu kader, yang memperkuat jaringan pendidikan politik secara berkelanjutan dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif.

Website resmi KPU Kebumen menyediakan arsip berita, agenda kegiatan, dan dokumentasi visual yang dapat diakses kapan saja, memudahkan masyarakat memperoleh informasi valid dan terbaru mengenai tahapan Pilkada, peraturan, serta hak dan kewajiban pemilih, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Selain kegiatan digital, KPU juga menggelar kegiatan offline seperti pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dan sosialisasi pengawasan pemilihan, yang didukung publikasi terbuka di website sebagai bahan edukasi masyarakat. Melalui pendekatan digital yang terintegrasi, KPU Kebumen berhasil menjaring partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui partisipasi pemilih yang berpengetahuan dan kritis, serta mengurangi kesenjangan informasi dalam pendidikan politik konvensional.

Secara keseluruhan, strategi pendidikan politik tidak langsung KPU Kebumen melalui website dan platform digital merupakan inovasi penting dalam menghadapi Pilkada 2024, dengan pendekatan edukatif, transparan, dan partisipatif yang berhasil membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan, mendorong partisipasi pemilih, dan menjaga integritas proses demokrasi di Kebumen.

3. Media Televisi dan Radio

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen mengimplementasikan berbagai strategi pendidikan politik untuk mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu metode tidak langsung yang efektif adalah pemanfaatan media elektronik, khususnya televisi lokal dan radio, untuk menyebarkan informasi dan pesan edukatif secara merata hingga ke daerah pedesaan dan pelosok yang sulit dijangkau metode konvensional.

Melalui kerja sama dengan stasiun televisi lokal seperti Ratih TV dan radio lokal seperti Radio INFM Kebumen serta Radio Swara Kenanga, KPU Kebumen menyiarkan konten

edukatif mengenai pentingnya partisipasi politik, tahapan Pilkada, tata cara pencoblosan, dan peran masyarakat dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Siaran televisi tidak hanya berupa iklan layanan masyarakat, tetapi juga talkshow dan dialog interaktif yang menghadirkan narasumber internal KPU dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu pemilu dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab politiknya.

Contoh program talkshow adalah "Menenal Pilkada 2024 Lebih Dekat" yang tayang dua minggu sekali di Ratih TV, membahas topik seperti pemilih cerdas, bahaya politik uang, dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Program ini mendapat respons positif dengan banyaknya pertanyaan dari penonton melalui media sosial dan hotline. Di sisi lain, radio menjadi media penting untuk menjangkau wilayah yang belum terjangkau televisi, dengan program seperti "Sapa Demokrasi" di Radio INFM yang menyajikan dialog interaktif dan monolog informatif mengenai tahapan Pilkada, hak pemilih, serta penolakan hoaks dan ujaran kebencian selama kampanye.

"Untuk Pilkada 2024 ini, kami di KPU Kebumen nggak cuma ngandalkan sosialisasi langsung ke masyarakat aja. Tapi kami juga manfaatin media elektronik kayak TV lokal dan radio buat nyebarin informasi tentang Pilkada. Soalnya, kita sadar nggak semua orang bisa datang ke acara sosialisasi langsung. Ada yang sibuk kerja, ada juga yang tinggal di daerah yang agak jauh. Nah, media ini jadi jembatan buat kita. Di situ kita bahas soal tahapan Pilkada, pentingnya milih, sampe ngajak masyarakat buat cek data pemilih. Kadang kita juga undang tokoh masyarakat atau pemuda buat ngobrol bareng biar lebih akrab dan santai suasananya." (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sodiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

KPU Kebumen juga mengemas siaran secara menarik dan komunikatif, misalnya dengan segmen kuis berhadiah untuk menarik perhatian terutama kalangan muda, sehingga pendidikan politik menjadi informatif sekaligus menghibur dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Semua siaran ini didokumentasikan secara internal untuk evaluasi dan laporan pertanggungjawaban, serta sebagai arsip untuk pengembangan program ke depan.

Pendekatan media elektronik ini terbukti efektif karena jangkauannya luas, penyebaran informasi cepat, dan fleksibel menyesuaikan format pesan sesuai karakter audiens, keunggulan

dibandingkan metode tatap muka yang terbatas ruang dan waktu. Namun, KPU Kebumen tetap menjalankan strategi ini secara komplementer dengan sosialisasi tatap muka, pemasangan baliho, dan kampanye digital melalui media sosial agar pendidikan politik dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi akses.

Dengan strategi yang matang dan terintegrasi ini, KPU Kebumen menunjukkan komitmen membangun kesadaran politik masyarakat melalui media elektronik, tidak hanya menyampaikan informasi teknis pemilu tetapi juga menanamkan nilai demokrasi, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada 2024 dan membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

4.. Media Bahan Sosialisasi

Pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau diskusi publik, tetapi juga secara tidak langsung melalui media cetak visual yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam rangka Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen menggunakan media seperti pamflet, poster, dan baliho sebagai bagian dari strategi edukasi politik kepada masyarakat. Strategi ini dinilai efektif karena memiliki jangkauan luas dan sifatnya yang pasif namun berulang, sehingga pesan yang disampaikan dapat terus dilihat dan diingat oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mereka.

“Strategi pendidikan politik secara tidak langsung merupakan pendekatan yang kami lakukan melalui media atau alat peraga sosialisasi, seperti baliho, poster, dan pamflet. Meskipun tidak melibatkan pertemuan tatap muka secara langsung, media ini tetap memiliki daya jangkauan yang luas dan efektif dalam menyampaikan informasi dasar kepemiluan kepada masyarakat. media seperti baliho dan poster mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan, terutama di ruang-ruang publik. Kedua, secara visual, media ini mampu menarik perhatian warga dan menyampaikan pesan-pesan penting secara ringkas. Ketiga, media ini bisa menjangkau wilayah yang secara geografis cukup jauh dari pusat kegiatan, seperti desa-desa pelosok di Kebumen.”
(Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Pamflet menjadi salah satu media edukasi yang disebarkan oleh KPU Kebumen dalam berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan. Pamflet tersebut berisi informasi penting mengenai tahapan Pilkada, tata cara memilih yang benar, pentingnya menggunakan hak suara, serta

ajakan menolak politik uang. Distribusi pamflet dilakukan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, pasar murah, dan car free day, sehingga pamflet mampu menjangkau masyarakat di ruang publik dengan konten yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami.

Poster juga dimanfaatkan secara optimal sebagai media visual statis. KPU Kebumen mencetak dan menempelkan poster edukatif di fasilitas umum seperti kantor desa, balai RW, sekolah, pasar tradisional, terminal, dan masjid. Poster-poster ini biasanya menyampaikan pesan moral tentang pentingnya partisipasi politik, ajakan memilih cerdas, serta penolakan terhadap politik identitas dan hoaks. Ukuran yang besar dan desain warna-warni membuat poster menarik perhatian masyarakat.

Baliho menjadi media kampanye pendidikan politik yang paling dominan dari segi ukuran dan jangkauan visual. KPU Kebumen memasang baliho di titik strategis seperti perempatan jalan besar, area pasar, bundaran kota, serta jalur menuju kawasan perkantoran dan pemerintahan. Baliho biasanya berisi slogan singkat yang kuat dan ilustrasi visual yang mudah dipahami, seperti slogan “Ayo Memilih, Suaramu Menentukan Masa Depan Kebumen” yang menjadi tema utama sosialisasi Pilkada 2024.

Pembuatan media cetak tersebut dilakukan dengan melibatkan desainer profesional dan konsultan komunikasi visual agar pesan politik disampaikan dengan bahasa ringan, netral, dan tidak memihak calon manapun. KPU juga melakukan uji publik terhadap beberapa desain untuk memastikan efektivitas penyampaian pesan, menunjukkan komitmen menjaga netralitas dan edukasi nonpartisan dalam sosialisasi. Konten visual pada pamflet dan poster banyak menggunakan ilustrasi tokoh kartun lokal dan simbol budaya daerah untuk mendekatkan pesan kepada masyarakat Kebumen. Penggunaan batik, gambar wayang, dan ikon lokal memperkuat kesan bahwa Pilkada adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat dan identitas lokal, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

Distribusi pamflet dan penempelan poster tidak hanya dilakukan oleh pegawai KPU, tetapi juga oleh relawan demokrasi (Relasi) yang aktif menyebarkan pamflet hingga ke desa-desa pelosok dan membantu menjelaskan isi pamflet secara lisan jika diperlukan. Keberadaan relawan ini sangat membantu memperluas jangkauan pesan KPU ke komunitas yang sulit dijangkau media elektronik atau digital. Pemasangan baliho juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan pihak keamanan agar tidak mengganggu ketertiban umum. KPU memastikan lokasi baliho tidak berdekatan dengan lokasi kampanye pasangan calon untuk

menjaga netralitas. Beberapa baliho dilengkapi QR code yang dapat dipindai masyarakat untuk memperoleh informasi tambahan secara digital, menunjukkan integrasi media cetak dan digital.

Respon masyarakat terhadap pamflet, poster, dan baliho ini cenderung positif. Warga di Kecamatan Karanganyar dan Gombong mengaku lebih mudah memahami pentingnya memilih setelah membaca poster di balai desa, dan beberapa ibu rumah tangga menyimpan pamflet KPU sebagai pengingat tanggal pencoblosan. Hal ini menunjukkan strategi tidak langsung melalui media cetak memiliki dampak informatif yang signifikan. Strategi pendidikan politik melalui media cetak ini menjadi solusi alternatif untuk menjangkau masyarakat di tengah keterbatasan interaksi langsung akibat perubahan pola komunikasi pascapandemi. Edukasi pasif melalui media visual statis ini efektif mempengaruhi kesadaran politik masyarakat dan melengkapi strategi langsung seperti sosialisasi tatap muka atau siaran radio dan televisi.

Keberhasilan strategi ini didukung oleh komitmen KPU Kebumen mengadaptasi pendekatan edukasi berbasis masyarakat. KPU memahami bahwa tidak semua kalangan aktif mencari informasi secara daring, sehingga media konvensional seperti pamflet dan baliho tetap relevan bagi sebagian besar penduduk Kebumen yang tinggal di pedesaan atau daerah dengan akses internet terbatas. Pendekatan ini mencerminkan inklusivitas dalam pendidikan politik.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KEBUMEN 2024

Bab ini menyajikan data serta analisis temuan di lapangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kebumen 2024. Dalam bab ini juga dijelaskan berbagai program pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kebumen guna mendorong peningkatan partisipasi politik pada Pilkada 2024. Analisis yang disajikan didasarkan pada fakta lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi literatur serta dokumen pendukung. Selain itu, bab ini menguraikan analisis mendalam yang menggunakan landasan teori Struktur Fungsional untuk mengevaluasi dampak peran KPU Kebumen dalam mencapai tujuan Pilkada 2024.

A. Faktor Pendorong Strategi Pendidikan Politik KPU

Efektivitas dalam pendidikan politik merujuk pada sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menggambarkan kemampuan model pendidikan politik dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya saat pemilu (Yusriati, 2020). Dengan kata lain, efektivitas mengukur hasil nyata dari pelaksanaan pendidikan politik apakah sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Strategi merupakan ilmu dan seni dalam memanfaatkan kemampuan, sumber daya, serta lingkungan secara optimal dengan cara yang paling efektif. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan secara logis untuk menciptakan berbagai alternatif pilihan terbaik yang akan menjadi panduan taktis dalam menjalankan operasional organisasi (Mulyana, 2010).

Faktor-faktor yang mendukung strategi pendidikan politik KPU sangat penting untuk memastikan program tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Salah satu faktor kunci adalah kualitas materi dan metode pembelajaran yang diterapkan. Materi yang relevan, mudah dipahami, dan disampaikan melalui metode interaktif seperti dialog, diskusi, serta pemanfaatan media digital, mampu meningkatkan pemahaman dan ketertarikan masyarakat, khususnya para pemilih pemula, terhadap isu politik dan mekanisme pemilu. Selain itu, adanya dukungan regulasi dan

kebijakan yang kuat dari pemerintah dan KPU memberikan dasar hukum serta sumber daya yang cukup untuk menjalankan program pendidikan politik secara terencana dan berkelanjutan.

1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan keterlibatan seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan politik, terutama untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat menjelang Pilkada 2024. Kompetensi SDM KPU Kebumen mencakup tidak hanya kemampuan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga keahlian dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan politik yang efektif dan inklusif.

KPU Kebumen secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan politik yang melibatkan seluruh pegawai sebagai pelaksana utama. Salah satu kegiatan yang konsisten dilakukan adalah talkshow "KPU Kebumen Menyapa" yang disiarkan melalui YouTube, menghadirkan narasumber dari partai politik dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai fungsi partai politik, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih. Program ini menjadi media interaktif yang efektif dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

*“Saya melihat semuanya sangat kompeten, sangat signifikan, sangat punya peran yang strategis dan sangat ada di garda terdepan, karena mereka akan lahir implementasi teknis atas apa rencana yang kita matangkan, mereka yang melakukan eksekusi, mereka yang mensukseskan dari penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini tidak lepas dari perjuangan jerit payah mereka Ketika tahapan berjalan, bahkan mereka hanya berkonsentrasi pada tanggung jawab mereka, berjibaku di urusan logistic dan di urusan data, baik itu di urusan bagaimana KPU itu bisa diterima baik oleh Masyarakat, saya rasa itu yang kemudian menjadi effort energi mereka, bahwa kita kadang berpedoman kepada komisioner dan sekretariat haram sakit, nah ini bisa sebagai suatu integritas kita”
(Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).*

Keterlibatan pegawai KPU juga terlihat dalam sosialisasi yang ditujukan pada kelompok masyarakat khusus, seperti komunitas difabel. Pada November 2024, KPU Kebumen mengadakan sosialisasi bagi komunitas disabilitas dengan menyediakan juru bahasa isyarat agar materi dapat diterima dengan baik oleh peserta tuna rungu, menunjukkan

komitmen KPU terhadap inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan politik. Selain itu, SDM KPU Kebumen terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan kursus kepemiluan, termasuk program bagi siswa dan mahasiswa yang menjalani praktek kerja lapangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pegawai dalam pendidikan politik, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi ke generasi muda sebagai pemilih potensial.

Menjelang Pilkada 2024, KPU Kebumen aktif mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran calon serta sosialisasi tahapan pemilu. Keterlibatan pegawai dalam koordinasi ini memperlihatkan peran SDM KPU sebagai mediator dan fasilitator yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Gambar 13 Pegawai KPU Kebumen melaksanakan Sosialisasi



Sumber: kebumen24.com

Program pendidikan politik KPU Kebumen menekankan prinsip demokrasi sehat, seperti anti-mahar dan penolakan politik uang, yang disampaikan melalui dialog interaktif dengan kader partai politik dan tokoh publik. Dengan demikian, KPU tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang mekanisme pemilu, tetapi juga membentuk budaya politik yang berintegritas dan beretika. Keterlibatan seluruh pegawai menciptakan sinergi antar unit kerja di KPU Kebumen, dari divisi sosialisasi, hukum, hingga teknis penyelenggaraan, yang bersama-sama merancang dan melaksanakan program pendidikan politik agar informasi yang disampaikan komprehensif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penggunaan media digital menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pendidikan politik. Selain talkshow di YouTube, KPU memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan informasi

terkait tahapan pemilu, pendaftaran calon, dan edukasi pemilih, yang sangat relevan untuk menjangkau generasi muda.

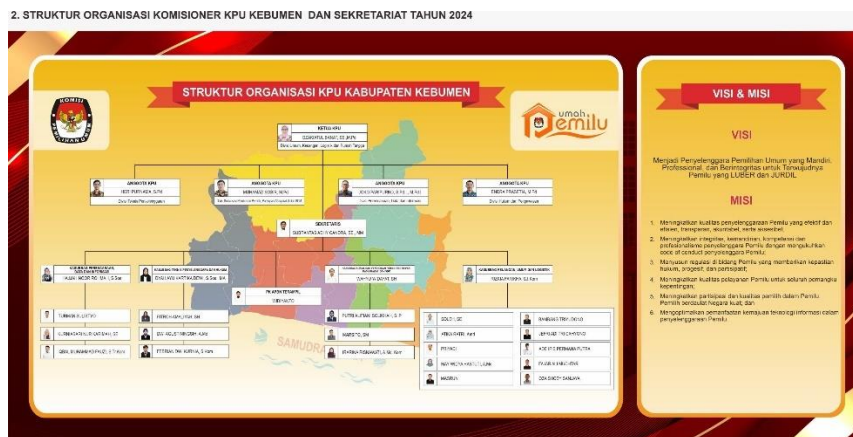
Dalam rangka mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kebumen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen menempatkan sejumlah pejabat dan staf strategis pada posisi kunci sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, di mana setiap individu berperan saling melengkapi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berlangsung secara demokratis, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Divisi Umum, Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga yang dipimpin oleh Ibu Dzakiatul Banat, S.E., M.Pd, memegang peranan penting dalam merencanakan dan mengelola anggaran Pilkada, menyediakan serta mendistribusikan logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan TPS, serta mengelola fasilitas kantor KPU. Beliau juga memastikan ketersediaan logistik tepat waktu dan dalam kondisi baik, serta menjalankan administrasi rumah tangga dengan tertib dan efisien.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang dijabat oleh Bapak Heri Purnama, S.Pd, bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kelancaran tahapan teknis Pilkada, seperti pencalonan kepala daerah, pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. Selain itu, beliau menyusun pedoman teknis, memantau simulasi pemungutan suara, dan memastikan seluruh proses sesuai ketentuan teknis KPU RI.
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) yang dipimpin oleh Bapak Muhamad Sobir, M.Pd, bertugas mengoordinasikan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi pemilih lewat program pendidikan politik, serta mengelola rekrutmen dan pembinaan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Beliau juga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan informasi dan literasi politik.
- d. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yang dipimpin oleh Bapak Joko Paripurno, S.Pd.I., M.Pd.I, bertanggung jawab memperbarui dan menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT), mengintegrasikan dan memvalidasi data pemilih, serta menyajikan data secara digital melalui sistem informasi. Beliau juga mengawal

implementasi teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akurasi data pemilu.

- e. Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Subrantas Adhy Canndra, S.E., M.M, mengoordinasikan seluruh bagian sekretariat, mengatur komunikasi internal, dan mengintegrasikan dukungan administratif untuk kelancaran kerja semua divisi.
- f. Di bawah sekretariat, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Ibu Hajjah Noor Rohmah, S.Sos, bertugas secara teknis dan administratif dalam mengelola perencanaan strategis serta pengolahan data pemilu, termasuk mendukung pemetaan TPS dan penyusunan kebutuhan logistik berbasis data pemilih.
- g. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum, Ibu Dyah Ayu Kartika Dewi, S.Sos., M.A, mendukung pelaksanaan teknis Pilkada dan mengelola aspek hukum, termasuk penanganan sengketa dan penyusunan dokumen hukum, serta memperkuat kapasitas penyelenggara dalam regulasi.
- h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN Terampil, Bapak Widiyanto, bertugas mengatur pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN, memastikan administrasi keuangan tertib, dan menjamin penggunaan anggaran Pilkada sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- i. Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Bapak Wahyu Widayat, S.H, bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan politik, pelibatan komunitas lokal, serta mengelola manajemen SDM penyelenggara adhoc di lapangan.
- j. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, Ibu Rizkia Farikha, S.I.Kom, menangani pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan belanja Pilkada, serta memastikan pengadaan dan distribusi logistik sesuai rencana dan jadwal tahapan.

Gambar 14 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kebumen



Sumber: KPU Kebumen

2. Interaksi Langsung Masyarakat

Penggunaan metode sosialisasi langsung dalam meningkatkan pendidikan politik pada Pilkada 2024 di Kabupaten Kebumen merupakan strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan politik secara personal dan langsung kepada masyarakat. Metode ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemilih pemula sebagai kelompok utama, sehingga komunikasi dan transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih intensif dan interaktif. Pendekatan ini penting karena sosialisasi politik tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan sikap dan kesadaran politik yang mendalam.

Tokoh masyarakat memegang peran strategis dalam metode ini karena mereka dipercaya dan dihormati oleh komunitasnya. Dengan keterlibatan tokoh masyarakat, pesan pendidikan politik dapat tersampaikan lebih mudah dan mendapat respons positif dari warga. Mereka dapat memfasilitasi dialog, memberikan contoh konkret partisipasi politik yang baik, serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di daerah dengan informasi politik yang masih minim.

Selain itu, pemuda menjadi sasaran utama sosialisasi langsung karena mereka adalah generasi penerus yang berpotensi membangun kesadaran politik berkelanjutan. KPU Kebumen telah mengadakan berbagai kegiatan seperti “KPU Goes To Campus” yang menasar mahasiswa dan pemilih muda dengan tujuan memberikan edukasi politik yang komprehensif. Melalui kegiatan ini, pemuda diajak menjadi pemilih cerdas yang mampu menilai calon pemimpin berdasarkan visi, misi, dan integritas.

Pemilih pemula, umumnya berusia 17 tahun ke atas, juga menjadi fokus utama dalam sosialisasi langsung. Pendidikan politik bagi pemilih pemula penting agar mereka memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih serta proses pemilu secara menyeluruh. Sosialisasi mencakup tahapan pemilihan, cara menilai calon, serta pengenalan aturan dan etika pemilu. Dengan demikian, pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta terhindar dari pengaruh negatif seperti politik uang atau kampanye hitam. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Dengan adanya Sosialisasi dari KPU Kebumen itu sangat membantu respon cepat dari pemuda, khususnya pemilih pemula mas, kita jadi tau pentingnya demokrasi, suara kita nantinya juga kan yang terbaik untuk kemaslahatan kota kita dan negeri ini juga kan yaa, dari yang tadinya gak tau tatacara mencoblos saat pilkada ataupun pemilu terus saya jadi paham dan antusias selalu saat perhelatan pilkada kemarin, karena zaman sekarag itu menurut saya sih pemuda terutama mahasiswa juga harus paham dan melek politik demi kelanjutan pemimpin yang baik untuk negeri ini” (Wawancara Fawwaz, Pemilih Pemula dan juga Mahasiswa UMNU Kebumen/24 Mei 2025).

Metode sosialisasi langsung yang melibatkan interaksi tatap muka memungkinkan dialog dua arah antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, memberikan kesempatan bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan klarifikasi langsung terkait proses pemilihan. KPU Kebumen juga mengadakan talkshow dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh politik, sehingga pesan pendidikan politik dapat disampaikan secara dinamis dan menarik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen secara intensif menggelar sosialisasi terkait Pilkada 2024 di berbagai lokasi strategis, termasuk pasar-pasar tradisional di wilayah Kebumen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Dengan melakukan sosialisasi di pasar, KPU Kebumen mampu menjangkau beragam kelompok masyarakat secara langsung, seperti pedagang dan pengunjung pasar yang merupakan elemen penting dalam komunitas setempat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyampaikan informasi mengenai tata cara pemilihan, prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), serta menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada. Melalui langkah ini, KPU Kebumen berupaya

memastikan masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas demokrasi di Kebumen.

“Saya mendukung penuh upaya KPU. Pendidikan politik bukan hanya kewajiban KPU, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kita harus mengajak warga sekitar menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab. Saya yakin jika masyarakat memahami prinsip pemilu yang Luber Jurdil, proses Pilkada berjalan lancar. Pilkada Kebumen 2024 akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Kita wajib saling mengingatkan agar tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah. Persatuan dan kedamaian masyarakat harus dijaga di atas segala perbedaan politik. Pendidikan politik yang baik akan memperkuat demokrasi dan kualitas pemilihan. Pilkada dengan kesadaran dan kebersamaan demi masa depan yang lebih baik.”(Wawancara Muslim Burhani, Tokoh Agama sekaligus Masyarakat Desa Tersobo, Kec. Prembun, Kab. Kebumen/24 Mei 2025).

Pendidikan politik melalui sosialisasi langsung tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap demokrasi. Peserta diajak memahami pentingnya memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi pada terciptanya pemilu berkualitas dan demokrasi sehat.

Keberhasilan sosialisasi langsung bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi kegiatan. KPU Kebumen rutin menggelar program edukasi politik sepanjang tahun, termasuk talkshow, kursus kepemiluan, dan sosialisasi di kampus maupun komunitas. Pendekatan berkelanjutan ini memperkuat pesan politik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam konteks Pilkada 2024, sosialisasi langsung yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemilih pemula di Kebumen menjadi model efektif dalam meningkatkan partisipasi politik. Melibatkan tokoh masyarakat memberikan legitimasi sosial kuat pada pesan politik, sedangkan melibatkan pemuda dan pemilih pemula menanamkan nilai demokrasi sejak dini sehingga menciptakan pemilih cerdas dan bertanggung jawab.

Gambar 15 Sosialisasi Secara langsung oleh KPU Kebumen



Sumber: Instagram KPU Kebumen

Sosialisasi KPU Kebumen juga memperhatikan inklusivitas dan aksesibilitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapat kesempatan sama berpartisipasi dalam Pilkada. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi adil dan merata serta mendorong partisipasi lebih luas. Melalui metode sosialisasi langsung, KPU Kebumen membangun ekosistem politik partisipatif dan demokratis. Pesan pendidikan politik yang disampaikan secara langsung dan personal mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilih dan memahami pentingnya peran mereka dalam proses politik lokal, yang berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Kebumen.

Secara keseluruhan, penggunaan metode sosialisasi langsung oleh KPU Kebumen dalam meningkatkan pendidikan politik pada Pilkada 2024 merupakan langkah strategis efektif. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemilih pemula sebagai peserta utama menjadikan proses sosialisasi lebih relevan, inklusif, dan berdampak. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih tetapi juga memperkuat budaya demokrasi sehat di Kabupaten Kebumen.

3. Penggunaan Media Sosial Yang Masif

Penggunaan media sosial dan teknologi digital oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan politik menjelang Pilkada 2024. KPU memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok secara aktif untuk menyebarkan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses, terutama bagi pemilih muda dan pemula yang lebih familiar dengan teknologi digital.

Materi pendidikan politik dikemas dalam bentuk video singkat, infografis, dan debat pasangan calon yang disebarluaskan melalui media sosial. Format ini efektif karena menyajikan informasi secara ringkas dan visual, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik bagi generasi muda yang memiliki rentang perhatian singkat. Pendekatan ini juga membantu menjangkau

masyarakat yang tinggal di luar daerah dan sulit dijangkau dengan metode konvensional. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan KPU Kebumen melakukan edukasi politik secara luas dan efisien. Dengan akses internet, konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan dan frekuensi penyampaian informasi, yang penting untuk membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi dua arah antara KPU dan masyarakat, di mana masyarakat dapat memberikan pertanyaan, komentar, atau tanggapan secara langsung melalui fitur komentar atau live streaming debat calon. Interaksi ini memperkuat pemahaman politik dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam demokrasi. KPU Kebumen juga menyelenggarakan program Kuliah Demokrasi dan Pemilu yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pemilu dan demokrasi, yang kemudian didukung dengan penyebaran materi melalui media sosial untuk menjangkau audiens lebih luas. Kombinasi pendekatan tatap muka dan digital ini meningkatkan efektivitas pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Kita sangat memaksimalkan Media Sosial dan teknologi digital sebagai sarana utama kita dalam menyampaikan Pendidikan politik kepada masyarakat. Platform kita seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok digunakan secara aktif untuk menyebarluaskan informasi seputar Pilkada 2024 ini. Melalui Media Sosial tersebut kita menghasilkan berbagai macam konten edukatif dan menarik, seperti infografis, video ajakan memilih, serta penayangan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih muda dan pemilih pemula, agar lebih antusias dalam mendukung pilihannya secara cerdas dan bertanggung jawab.”.
(Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

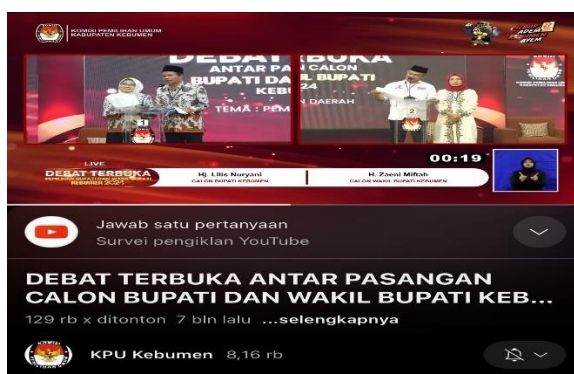
Namun, efektivitas penggunaan media sosial dan teknologi digital dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya seperti dana dan waktu. Tidak semua lembaga pendidikan atau komunitas dapat dijangkau secara merata, sehingga KPU harus mengoptimalkan media digital sebagai solusi yang lebih efisien secara biaya. Tantangan lain adalah tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Tidak semua pemilih, terutama di daerah terpencil atau kelompok usia lanjut, memiliki kemampuan atau akses memadai untuk menggunakan media sosial secara

optimal. Oleh karena itu, strategi digital perlu dilengkapi dengan pendekatan konvensional agar pendidikan politik dapat diterima secara merata.

Penggunaan media sosial juga menghadapi risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. KPU Kebumen harus memastikan konten yang disebarakan bersifat edukatif, netral, dan terpercaya agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Keberhasilan KPU Kebumen dalam memanfaatkan teknologi digital didukung oleh kolaborasi dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi dan kepolisian, yang memperkuat legitimasi dan memperluas jaringan penyebaran informasi politik yang kredibel.

Respons positif masyarakat, terutama pemilih muda, yang antusias mengikuti konten edukatif dan diskusi politik daring menunjukkan efektivitas media sosial dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik generasi muda. Secara keseluruhan, penggunaan media sosial dan teknologi digital oleh KPU Kebumen merupakan strategi yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan politik di era digital. Strategi ini mampu menjangkau kelompok pemilih yang sebelumnya sulit dijangkau dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.

Gambar 16 Pemanfaatan Media Sosial KPU Kebumen



Sumber: Youtube KPU Kebumen

Untuk hasil optimal, KPU perlu terus mengembangkan konten yang inovatif dan interaktif serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas media sosial sebagai sarana pendidikan politik. Penguatan literasi digital masyarakat juga penting agar pesan politik dapat diterima dengan baik dan tidak disalahartikan. Selain itu, KPU Kebumen harus mengatasi keterbatasan dana dan waktu dengan menggandeng dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan agar program pendidikan politik dapat dilaksanakan lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital oleh KPU

Kebumen tidak hanya meningkatkan efektivitas pendidikan politik tetapi juga memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik yang inklusif dan merata, khususnya menjelang Pilkada 2024.

B. Faktor Penghambat Strategi Pendidikan Politik KPU

Faktor yang menghambat efektivitas strategi meliputi kendala seperti kurangnya pelatihan, motivasi yang rendah, serta masalah komunikasi internal yang berpengaruh negatif terhadap kinerja dan pencapaian target strategi layanan. Hal ini menegaskan bahwa sumber daya manusia dan komunikasi internal menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan strategi tersebut (Suryatama, 2023). Efektivitas strategi pendidikan politik yang dijalankan KPU terhambat oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personel maupun keterampilan yang kurang memadai, terutama dalam menghadapi tantangan digital. Hal ini menyebabkan penyampaian materi pendidikan politik kurang menarik dan kurang optimal, khususnya kepada generasi muda. Kedua, motivasi pelaksana program yang rendah turut menurunkan kualitas pelaksanaan strategi. Ketiga, komunikasi internal yang tidak efektif menghambat koordinasi antar tim, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, keterbatasan akses dan sarana prasarana di daerah terpencil memperparah kesenjangan penyebaran pendidikan politik. Fenomena hoaks dan disinformasi juga merusak kualitas informasi politik yang diterima masyarakat, menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, KPU perlu meningkatkan pelatihan SDM, memperbaiki komunikasi internal, dan memanfaatkan media sosial secara efektif. Kampanye anti hoaks yang terkoordinasi juga penting untuk menjaga kejelasan informasi. Strategi holistik ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara signifikan.

1. Disinformasi dan Politik Uang

Disinformasi dan politik uang masih menjadi masalah yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama menjelang Pilkada 2024. Kedua fenomena ini menjadi tantangan utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen dalam menciptakan budaya politik yang sehat dan rasional. Disinformasi, sering berupa hoaks, menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sementara itu, politik uang yang sudah mengakar, merusak integritas pemilu dan mengancam kualitas demokrasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Kalau ngomongin soal hoaks dan politik uang di Pilkada 2024, memang jadi tantangan besar buat kita di KPU Kebumen, terutama di bagian sosdiklih parmas dan SDM. Hoaks masih sering banget beredar, bikin orang jadi bingung dan kadang nggak percaya sama proses demokrasi yang kita jalankan. Apalagi politik uang yang udah kayak kebiasaan, ini juga bikin kita susah bangun budaya politik yang sehat dan masuk akal. Makanya, kita terus berusaha sosialisasi dan edukasi supaya masyarakat bisa lebih pinter dalam nerima informasi, cek dulu fakta sebelum percaya atau nyebarin, dan tentu aja tolak politik uang supaya pilkada bisa berjalan jujur dan adil.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Politik uang adalah manipulasi elektoral dengan memberikan uang, barang, atau imbalan materi kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga pemilih di Indonesia pernah menjadi target politik uang dalam pemilu sebelumnya, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat politik uang tertinggi di dunia. Praktik ini melibatkan berbagai partai politik yang berlomba memenangkan kontestasi dengan cara transaksional.

Sulitnya menghilangkan politik uang disebabkan oleh struktur dan budaya hukum yang permisif terhadap demokrasi transaksional, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik ini. Sebagian masyarakat bahkan menganggap politik uang sebagai kompensasi yang wajar akibat kekecewaan terhadap politisi dan korupsi yang marak. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

“Tantangan terbesar kita saat ini salah satunya itu adalah melawan disinformasi dan politik uang yang masih membudaya, praktik politik uang tidak hanya terjadi antara kandidat dan pemilih, tetapi juga melibatkan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Selain itu, penyebaran disinformasi atau hoaks yang meluas berpotensi memecah belah masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap jalannya proses demokrasi.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Pendidikan politik yang digalakkan menekankan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program calon, bukan karena iming-iming materi atau informasi menyesatkan.

Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu dan melaporkan pelanggaran seperti politik uang dan hoaks. Politik uang yang berbiaya tinggi juga berdampak buruk pada kualitas pemerintahan pasca-pemilu, karena kandidat yang mengeluarkan biaya besar biasanya mencari cara mengembalikan modal, yang sering berujung pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga menyebabkan defisit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Penelitian mengusulkan evaluasi sistem pemilu, seperti beralih dari sistem proporsional terbuka ke tertutup, untuk mengurangi politik uang dan klientelisme. Sistem yang lebih berorientasi pada partai dan program diharapkan mendorong kompetisi yang sehat dan mengurangi pembelian suara secara langsung. KPU Kebumen juga mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih cerdas yang menolak politik uang dan disinformasi, dengan sosialisasi yang merangkul masyarakat untuk memahami dampak buruk politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan integritas calon.

Upaya bersama antara KPU, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi disinformasi dan politik uang. Masyarakat harus aktif melaporkan pelanggaran dan tidak menjadi bagian dari praktik transaksional yang merusak demokrasi. KPU Kebumen berkomitmen meningkatkan pendidikan politik dan pengawasan agar Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Diseminasi informasi yang benar dan edukasi politik berkelanjutan menjadi kunci membangun budaya politik sehat. KPU Kebumen memanfaatkan berbagai media untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih muda dan kelompok rentan yang sering menjadi target politik uang dan disinformasi. Pendidikan politik yang efektif tidak hanya menekan politik uang dan hoaks, tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih berkualitas. Dengan pemilih cerdas dan berintegritas, demokrasi dapat berjalan lebih baik, menghasilkan pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

2. Apatisme Politik

Apatisme politik merujuk pada sikap atau perilaku individu maupun kelompok yang menunjukkan kurangnya perhatian, ketidakpedulian, atau minimnya minat terhadap kegiatan

politik, termasuk keterlibatan dalam pemilu, diskusi politik, serta proses pengambilan keputusan politik. Dalam kajian akademis, apatisme politik sering dipelajari sebagai fenomena yang berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi politik dan menurunnya kualitas demokrasi. Apatisme politik dapat dipahami sebagai situasi di mana masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan publik di tingkat daerah, seperti di Kota Medan. Mereka menyoroti hubungan antara apatisme politik dengan kebijakan publik, yang menunjukkan bahwa sikap apatis dapat menghambat terciptanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ardiyanti, 2020).

"Kami menyadari bahwa apatisme politik di Kebumen memang masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan politik menjelang Pilkada 2024. Banyak masyarakat, terutama pemilih pemula, yang masih belum paham betul tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Ini membuat mereka cenderung cuek dan tidak peduli dengan proses pemilihan, Kami sudah berusaha melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui tatap muka maupun media sosial, tapi memang belum maksimal. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam mengubah mindset masyarakat yang selama ini terbiasa pasif dan mengikuti arus tanpa banyak pertimbangan" (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Tingginya tingkat apatisme politik di Kebumen menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan politik menjelang Pilkada 2024. Hal ini terutama terlihat pada pemilih pemula yang belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara membuat mereka cenderung bersikap acuh terhadap pemilihan kepala daerah. Akibatnya, partisipasi politik menjadi rendah sehingga sulit mewujudkan demokrasi yang sehat dan representatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan politik yang selama ini dilakukan belum berhasil secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan harapan masa depan demokrasi di Kebumen.

"Kami terus berupaya memperbaiki metode pendidikan politik agar lebih menarik dan mudah dipahami, terutama untuk generasi muda. Misalnya, dengan mengadakan diskusi interaktif, lomba kreatif, dan penggunaan media digital yang lebih inovatif. Namun, kami juga butuh dukungan dari berbagai pihak agar program ini bisa berjalan lebih efektif dan merata." Kami juga

menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Kalau masyarakat sudah percaya, mereka akan lebih terbuka dan antusias mengikuti pendidikan politik. Jadi, kami juga fokus pada transparansi dan komunikasi yang baik agar image KPU semakin positif di mata publik.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Apatisme politik terutama pada pemilih pemula sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh paparan negatif terhadap kasus korupsi yang sering muncul di media. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dan minat terhadap politik, sehingga generasi muda cenderung menjauh dari partisipasi politik aktif. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula dalam demokrasi (Husna, 2019). Risiko apatisme politik, terutama di kalangan pemuda, yang berpotensi mengancam stabilitas negara dan kelangsungan demokrasi. Mereka menegaskan pentingnya pendidikan partisipasi politik sebagai langkah untuk mengatasi apatisme serta meningkatkan kesadaran politik generasi muda, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses politik dan pembangunan nasional (Hapsari, 2022).

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pendidikan politik yang lebih kreatif dan mampu menyentuh aspek psikologis serta sosial masyarakat agar apatisme politik dapat berkurang secara signifikan. Pendekatan yang lebih interaktif dan sesuai konteks, seperti melalui media sosial, diskusi komunitas, serta keterlibatan tokoh lokal yang dipercaya, dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi pemilih pemula untuk aktif berpartisipasi. Selain itu, peran KPU dan lembaga terkait perlu diperkuat dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan Pilkada 2024 menjadi momentum kebangkitan partisipasi politik masyarakat Kebumen yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi di daerah tersebut.

Gambar 17 Sosialisasi KPU Kebumen kepada masyarakat agar tidak apatis



Sumber: radarjogja.jawapos.com

Tabel 5 Presentase Partisipasi dan Golput Pilkada Kebumen

Tahun	Partisipasi	Golput
2020	64,94%	35,06%
2024	71%	29%

Sumber: KPU Kebumen

Jumlah pemilih terdaftar (DPT) 2020: 1.082.031 orang. Jumlah yang menggunakan hak pilih: 700.014 orang Tingkat partisipasi: 64,94 % Tingkat golput (tidak memilih): sekitar 35,06 %. Sementara menurut hasil pleno rekapitulasi resmi KPU, tingkat partisipasi pemilih mencapai 71 % Dengan demikian, golput pada Pilkada 2024 adalah sekitar 29 % Ada peningkatan partisipasi sebesar sekitar 6 persen dari 2020 ke 2024. Alhasil, angka golput menurun dari ~35 % menjadi ~29 %, menunjukkan perbaikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Meski dari hasil data menurun, apatisme masyarakat khususnya pemilih muda masih menjadi halangan penting bagi KPU Kebumen sendiri.

3. Tingginya Jumlah Perantau

Tingginya jumlah perantau merupakan fenomena sosial di mana banyak individu meninggalkan daerah asalnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau peluang hidup yang lebih baik di tempat lain. Dalam konteks pendidikan politik dan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah seperti Kebumen, tingginya jumlah perantau dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dari perspektif sosial budaya, tingginya jumlah para perantau juga dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial yang telah terbentuk di lokasi tujuan. Jaringan tersebut mempermudah proses penyesuaian diri dan pencarian pekerjaan bagi para perantau baru, sehingga semakin

banyak individu yang terdorong untuk mengikuti langkah perantau sebelumnya (Wibowo, 2019). Kondisi ini kemudian menghasilkan pola migrasi yang berkelanjutan dan kadang-kadang menimbulkan dampak sosial, seperti perubahan dalam struktur keluarga dan komunitas di daerah asal.

Selain itu, aspek ekonomi yang muncul akibat tingginya jumlah perantau juga menjadi perhatian dalam penelitian. Uang kiriman dari para perantau ke kampung halaman dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menjadi modal penting untuk pembangunan di tingkat lokal (Hidayat R. , 2017). Namun demikian, banyaknya perantau juga dapat menimbulkan kekurangan tenaga kerja di daerah asal, terutama pada sektor pertanian dan industri lokal.

"Kami sadar kalau tingginya jumlah perantau ini jadi kendala besar buat kami dalam menyampaikan pendidikan politik, Soalnya, banyak dari mereka yang kerja atau sekolah di luar Kebumen, jadi susah buat kami untuk jangkau secara langsung. Makanya kami coba manfaatin media sosial dan platform online supaya mereka tetap bisa dapet info penting soal Pilkada. Tapi ya, meskipun sudah pakai cara digital, kadang masih ada yang belum kebagian info karena keterbatasan akses internet atau kesibukan mereka. Jadi kami juga terus berusaha bangun jaringan sama komunitas perantau supaya bisa bantu sosialisasi lebih efektif." (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Perantau yang berada di luar wilayah Kebumen sering kali sulit dijangkau oleh penyelenggara pemilu untuk mendapatkan edukasi politik secara mendalam. Hal ini berdampak pada partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah, karena mereka kurang memperoleh informasi yang memadai mengenai calon serta mekanisme pemilu di daerah asalnya. Selain itu, perantau umumnya memiliki jadwal yang padat di tempat kerja atau tempat studi mereka, sehingga waktu untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik menjadi sangat terbatas. Akibatnya, mereka kurang memahami pentingnya hak pilih dan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Situasi ini juga menjadi tantangan bagi KPU Kebumen dalam merancang strategi pendidikan politik yang efektif. KPU perlu mencari metode agar informasi politik dapat tersampaikan dengan baik kepada para perantau, baik melalui media digital maupun saluran komunikasi lainnya.

“Data pemilih yang akurat sangatlah penting agar program pendidikan politik yang kami jalankan tepat sasaran. Kami secara rutin memperbarui data dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan para perantau yang memiliki hak pilih tetap dapat berpartisipasi dalam Pilkada, Para perantau biasanya memiliki kesibukan masing-masing, sehingga kami perlu fleksibel dalam menjadwalkan kegiatan sosialisasi. Seringkali mereka hanya dapat ikut saat pulang ke kampung halaman. Oleh karena itu, kami memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan edukasi secara langsung. Dengan pendekatan yang terus disempurnakan dan kerja sama yang intensif, kita yakin dapat mengatasi tantangan tingginya jumlah perantau dalam pendidikan politik Pilkada 2024 agar tingkat partisipasi pemilih tetap optimal.” (Wawancara M. Sobir, M.Pd, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM/ 23 Mei 2025).

Selain itu, para perantau yang tinggal di luar daerah seringkali merasa kurang memiliki ikatan emosional dengan kampung halamannya, sehingga minat mereka untuk mengikuti pendidikan politik dan berpartisipasi dalam Pilkada menjadi menurun. Faktor sosial budaya juga memengaruhi, karena perantau lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan baru yang berbeda dari budaya politik di Kebumen. Kondisi ini membuat mereka lebih sulit untuk aktif terlibat dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh KPU Kebumen.

“Kalau kita lihat mahasiswa yang balik dari perantauan, sebenarnya mereka punya potensi besar buat ikut aktif di politik lokal, termasuk Pilkada 2024. Tapi, banyak dari mereka malah keliatan nggak peduli atau kurang semangat buat ngomongin politik. Mungkin karena selama di perantauan mereka udah biasa sama lingkungan yang beda, jadi merasa politik di kampung halaman itu nggak menarik atau malah kurang jelas. Makanya, pas pulang, mereka cenderung milih buat nggak terlalu ikut aktif, apalagi kalau merasa suara mereka nggak bakal didengerin atau nggak ada perubahan berarti.” (Wawancara Anwar, Mahasiswa asal Kediri yang pulang saat Pilkada 2024/24 Mei 2025).

Mahasiswa ataupun para pekerja dari perantauan yang kembali ke kampung halaman sebenarnya memiliki potensi besar untuk berpartisipasi aktif dalam politik lokal, termasuk dalam Pilkada 2024. Namun, banyak dari mereka menunjukkan sikap kurang peduli atau kurang antusias terhadap politik di daerah asal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proses adaptasi mereka selama merantau, sehingga politik lokal di kampung halaman terasa kurang

menarik atau kurang relevan. Selain itu, adanya keraguan bahwa suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan membawa perubahan berarti membuat mereka cenderung memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam politik lokal setelah kembali.

KPU Kebumen juga menghadapi tantangan dalam pendataan dan pembaruan data pemilih yang merantau. Ketidakkuratan data tersebut menyebabkan upaya pendidikan politik menjadi kurang tepat sasaran dan kurang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, KPU Kebumen berusaha memaksimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai media penyebaran informasi politik kepada para perantau. Namun, efektivitas strategi ini masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat perantau secara menyeluruh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024 dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 menggunakan pendekatan yang fleksibel. KPU memadukan metode sosialisasi langsung, seperti pertemuan tatap muka, diskusi komunitas, dan pelatihan bagi pemilih pemula, dengan metode tidak langsung melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital yang efektif menjangkau generasi muda dan pemilih baru. Pendekatan ini juga didukung oleh kerja sama lintas sektor dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama yang berperan sebagai penggerak partisipasi politik. Melalui strategi ini, KPU tidak hanya menyampaikan informasi mengenai prosedur pemilu dan pentingnya partisipasi, tetapi juga membangun motivasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kebumen. Sosialisasi tatap muka tetap menjadi metode utama untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses teknologi, sementara media digital memperluas jangkauan ke kelompok pemilih muda yang lebih melek teknologi. Secara keseluruhan, strategi pendidikan politik ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pendidikan politik KPU Kebumen dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi keterbukaan KPU terhadap inovasi teknologi dan komunikasi digital, dukungan dari tokoh masyarakat dan institusi lokal, serta antusiasme tinggi dari pemilih muda yang aktif di media sosial. Kolaborasi lintas sektor juga memperluas cakupan sosialisasi dan memperkuat pesan pendidikan politik yang disampaikan. Namun, hambatan yang signifikan masih ada, seperti rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, budaya politik lama yang cenderung apatis terhadap demokrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran KPU, serta tantangan geografis yang menyulitkan sosialisasi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan KPU untuk terus berinovasi, meningkatkan

kapasitas masyarakat, dan memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan evaluasi dan pengembangan strategi secara berkelanjutan, diharapkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kebumen berikutnya dapat meningkat, sehingga kualitas demokrasi di daerah ini dapat terus terjaga dan diperkuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dijadikan landasan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan temuan ini antara lain:

1. KPU Kebumen harus terus mengembangkan cara sosialisasi yang kreatif dan inklusif agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama pemilih muda dan perantau. Penggunaan media sosial dan platform digital perlu ditingkatkan, serta bekerja sama dengan komunitas lokal agar pesan pendidikan politik tersampaikan dengan baik. Kegiatan tatap muka di desa dan tempat keramaian saat perantau pulang sangat penting untuk edukasi langsung. KPU juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pemuda sebagai mitra strategis. Pembuatan konten menarik seperti video pendek dan podcast bisa memikat generasi muda. Simulasi pemungutan suara di sekolah dan kampus membantu pemilih baru memahami proses pemilu. Evaluasi rutin metode sosialisasi perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Layanan konsultasi atau hotline informasi harus disediakan agar mudah diakses masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media lokal harus diperluas untuk memperkuat jaringan informasi. Dengan sinergi dan transparansi, partisipasi politik di Kebumen diharapkan meningkat secara signifikan.
2. Masyarakat Kebumen diharapkan semakin menyadari pentingnya menggunakan hak pilih sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah. Setiap warga harus aktif mencari informasi tentang calon, visi, dan program Pilkada. Hindari terpengaruh berita hoaks atau isu yang belum jelas kebenarannya. Ikuti kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendidikan politik yang diselenggarakan KPU atau organisasi masyarakat. Ajak keluarga dan lingkungan untuk tidak golput agar menjadi agen perubahan. Jaga sikap kritis dan terbuka terhadap perbedaan pilihan demi demokrasi yang sehat. Manfaatkan layanan informasi resmi KPU untuk data pemilu yang valid. Dengan partisipasi aktif, masyarakat menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi Kebumen. Jadikan Pilkada sebagai momen pembelajaran politik yang positif. Bersama, kita wujudkan Pilkada yang partisipatif dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kebumen. (2024)
- Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). *Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19*. KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 18(01).
- Bawaslu Kabupaten Kebumen. (2024).
- Chaidir, M. R. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. Universitas Brawijaya.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*.
- David, F. R. (2009). *Strategic management: Concepts and cases (13th ed.)*. . Prentice Hall., 37.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). *Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 8(1).
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), 2024
- Dwirani, N. M., Fariz, T. R., Riani, F. E., Safitri, N., Umam, A. F., Jabbar, A., & Lutfiananda, F. (2022). *Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Kendal*. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 10(2), 139.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). *Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jisip), 6(1).
- Haryono, D. (2019). *Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015*. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 67-73.
- Hidayat, B. (2023). *ANALISIS STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA SOLOK* (Doctoral dissertation, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin).

- Hughes, D., & Hitchcock, G. (2008). Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6. Unpublished Thesis.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Kasim, S., Sonni, A. F., & Farid, M. (2023). *Analisis Strategi Pemanfaatan Media Komunikasi KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020*. Medium, 11(1), 111-123.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. (2024).
- Kompas.com. (2020, Desember 14). KPU sebut partisipasi pemilih Pilkada di Jateng meningkat, capai 74,34 persen.
- KPU RI. Visi dan Misi KPU. (2024)
- Lestari, A., Arsyad, D. H., Nurâ, A., Nursifa, N., Iqbal, M., & Safar, A. W. (2023). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Pelayanan Adminstrasi Publik di Dusun Salu Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli*. Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya, 1(2), 34-38.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Lp3s.
- Marsal, S., & Putra, E. V. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Sosiologi Politik*. Jurnal Perspektif, 2(3), 356-365.
- Megawati, M., & Padang, A. T. (2020). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, 1(3), 522-532.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*.
- Mulyana, I. (2010). *Manajemen dan kehidupan manusia*. Iman Mulyana.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Bina Aksara.
- Nur FM Rembang. (2024). *Pilkada Rembang 2024 Catat Partisipasi Tertinggi se-Jawa Tengah*. Nur FM Rembang.

- Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. International Labour Organization. KUTIPAN DAFPUS DEFINISI KONSEPTUAL
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe: Free Press.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 3(3), 427-442.
- Prihatono, M. F. N., & Taslim Djafar, S. PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- Profil KPU Kabupaten Kebumen. (2023).
- Putri, N. E. (2019). *Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Kada Tahun 2018*. Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 1(2), 191-198.
- Sastropetro, A. S. (1986). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. (No Title).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian (Pendekatan Kualitatif R, & D)*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Tuala, D., Rondonuwu, A., & Rengkung, F. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020*. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 13(1), 14-29.
- WAHYUNI, T. (2021). SKRIPSI PERSEPSI PEMILIH TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pemilih di Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen).
- Waluyo, A., & Santoso, S. B. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Geografis Pariwisata Berbasis Web Di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kebumen*. Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik), 2(1), 23-34.
- Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). *Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang*. Warta Dharmawangsa, 14(3), 500-507.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulkarnain, A. A., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, I. (2023). *Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 193-210.

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian/Wawancara Gambar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1070/Un.10.6/D1/KM.05.01/05/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

07 Mei 2025

Yth.
Bapak/Ibu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Strategi Pendidikan Politik KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kebumen 2024"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Dzaky Muhammad Daffa
NIM : 2106016071
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 12 Juli 2003
CP/e-mail : dzakymudavva@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Budy Priyadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tersobo, RT 02 RW 01, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Revisi Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Wawancara Dengan Pegawai KPU Kabupaten Kebumen





Waawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara Dengan PPS Desa



Wawancara Dengan Mahasiswa



Wawancara Dengan Masyarakat Umum





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dzaky Muhammad Daffa
TTL : Kebumen, 12 Juli 2003
Alamat : Tersobo RT 02/01, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah
NIM : 2106016071
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : dzakymudavva@gmail.com
No. HP : 085921685338

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 1 Tersobo	(2009-2015)
SMP N 2 Kutowinangun	(2015-2018)
SMA N 1 Prembun	(2018-2021)

RIWAYAT ORGANISASI

Anggota Ravelnas Himapol Indonesia	(2023)
Anggota IMAKE UIN Walisongo	(2022-2024)
Volunteer HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo	(2023)

RIWAYAT MAGANG

KPU Kabupaten Kebumen	(2024)
-----------------------	--------

RIWAYAT PEKERJAAN

PT KAI Wisata	(2023-2025)
Shopee Express Hub Semarang	(2023-2024)
Input Data Entri ATR/BPN Kebumen	(2023)
Anggota KPPS Pemilu 2024 & Pilkada 2024	(2024)
Input Data & Tabulasi Pilkada Kebumen	(2024)